



# RENSTRA

2025-2029

**BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN, PENELITIAN,  
DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA**

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
TAHUN 2025





BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 71 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor 282);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk periode Tahun 2025-2029.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025-2029.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
12. Tujuan adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya Visi selama 5 (lima) tahun.
13. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan Daerah menuju tercapainya Tujuan RPJMD.
14. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran Misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target Tujuan dan Sasaran RPJMD.
15. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai Tujuan/ Sasaran RPJMD.

### Pasal 2

Penyusunan Renstra PD dimaksudkan sebagai penjabaran operasional tujuan dan sasaran Daerah dalam bentuk program dan kegiatan PD untuk periode Tahun 2025-2029.

### Pasal 3

Penyusunan Renstra PD bertujuan untuk:

- a. merumuskan gambaran pelayanan yang akan diselenggarakan PD;
- b. merumuskan tujuan dan sasaran PD, arah kebijakan dan strategi, serta rencana program dan kegiatan PD dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran pembangunan Daerah; dan
- c. pedoman bagi PD dalam menyusun Renja PD.

## BAB II SISTEMATIKA

### Pasal 4

Renstra PD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan
- b. BAB II : Gambaran Umum Daerah
- c. BAB III : Visi, Misi, dan Program Prioritas pembangunan Daerah;
- d. BAB IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- e. BAB V : Penutup.

### Pasal 5

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- i. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- k. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- l. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- m. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- n. Sekretariat Daerah;
- o. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- p. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

- q. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- r. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- s. Inspektorat Daerah;
- t. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- u. Kecamatan Bantarkalong;
- v. Kecamatan Bojongasih;
- w. Kecamatan Bojongsambir;
- x. Kecamatan Ciawi;
- y. Kecamatan Cibalong;
- z. Kecamatan Cigalontang;
- aa. Kecamatan Cikalong;
- bb. Kecamatan Cikatomas;
- cc. Kecamatan Cineam;
- dd. Kecamatan Cipatujah;
- ee. Kecamatan Cisayong;
- ff. Kecamatan Culamega;
- gg. Kecamatan Gunungtanjung;
- hh. Kecamatan Jamanis;
- ii. Kecamatan Jatiwaras;
- jj. Kecamatan Kadipaten;
- kk. Kecamatan Karangjaya;
- ll. Kecamatan Karangnunggal;
- mm. Kecamatan Leuwisari;
- nn. Kecamatan Mangunreja;
- oo. Kecamatan Manonjaya;
- pp. Kecamatan Padakembang;
- qq. Kecamatan Pagerageung;
- rr. Kecamatan Pancatengah;
- ss. Kecamatan Parungponteng;
- tt. Kecamatan Puspahiang;
- uu. Kecamatan Rajapolah;
- vv. Kecamatan Salawu;
- ww. Kecamatan Salopa;
- xx. Kecamatan Sariwangi;
- yy. Kecamatan Singaparna;
- zz. Kecamatan Sodonghilir;
- aaa. Kecamatan Sukahening;
- bbb. Kecamatan Sukaraja;
- ccc. Kecamatan Sukarame;
- ddd. Kecamatan Sukaratu;
- eee. Kecamatan Sukaresik;
- fff. Kecamatan Tanjungjaya; dan
- ggg. Kecamatan Taraju.

#### Pasal 6

Rincian Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal, 24 Desember 2025

BUPATI TASIKMALAYA,



Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal, 24 Desember 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,



MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025 NOMOR 71

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 71 TAHUN 2025  
TENTANG RENCANA STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

**RENCANA STRATEGIS**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
**KABUPATEN TASIKMALAYA**  
**TAHUN 2025-2029**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas Petunjuk dan Hidayah-Nya sehingga Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat arah kebijakan, strategi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Pembangunan.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Penyusunan Rencana Strategis ini juga berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berisi serangkaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai, strategi dan arah kebijakan yang akan digunakan, serta implementasinya dalam rencana program dan kegiatan.

Rencana Strategis ini akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan serta sebagai alat ukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya. Kami menyadari bahwa Rencana Strategis

(Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 ini belum sempurna, untuk itu kami mohon masukan dan saran dari semua pihak.

Diharapkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 ini dapat diimplementasikan secara bertahap dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>I-1</b>
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-8
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-9
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPELITBANGDA</b> .....	<b>II-1</b>
2.1. Gambaran Pelayanan Bappelitbangda.....	II-1
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Bappelitbangda .....	II-52
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI</b> .....	<b>III-1</b>
3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Bappelitbangda Tahun 2025-2029.....	III-1
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Bappelitbangda dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Bappelitbangda Tahun 2025-2029 .....	III-5
<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	<b>IV-1</b>
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	IV-1
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	IV-68

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>V-1</b>
	5.1. Kesimpulan.....	V-1
	5.2. Kaidah Pelaksanaan.....	V-2
	5.3. Pedoman Transisi.....	V-3

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Berdasarkan Status Kepegawaian.....	II-20
Tabel 2.2.	Jumlah Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Berdasarkan Jabatan .....	II-20
Tabel 2.3.	Sarana dan Prasarana Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.....	II-23
Tabel 2.4.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.....	II-36
Tabel 2.5.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya .....	II-38
Tabel 2.6.	Mitra Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Dalam Pemberian Layanan.....	II-50
Tabel 2.7.	Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya.....	II-51
Tabel 2.8.	Kerja Sama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya.....	II-52
Tabel 2.9.	Pemetaan Permasalahan Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya.....	II-53
Tabel 2.10.	Rumusan Isu Strategis Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya.....	II-56
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 – 2029.....	III-3
Tabel 3.2.	Perumusan Strategi Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Dengan Analisis SWOT.....	III-8

Tabel 3.3.	Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya.....	III-12
Tabel 3.4.	Penahapan Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029.....	III-15
Tabel 3.5.	Arah Kebijakan Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029.....	III-16
Tabel 4.1.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 – 2029.....	IV-2
Tabel 4.2.	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya .....	IV-35
Tabel 4.3.	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	IV-63
Tabel 4.4.	Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya.....	IV-69
Tabel 4.5.	Indikator Kinerja Kunci Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya.....	IV-70

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.....	I-2
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Bappelitbangda.....	II-3

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang cukup besar, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan daerah. Kondisi geografis Kabupaten Tasikmalaya menghadirkan tantangan tersendiri dalam menghadapi berbagai permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah. Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 15 ayat (3) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek. Pembangunan Daerah merupakan suatu proses untuk mewujudkan berbagai tujuan yang dikehendaki dan dilaksanakan secara sistematis dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi serta tahapan penelitian dan pengembangan terhadap pemanfaatan hasil-hasilnya guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.

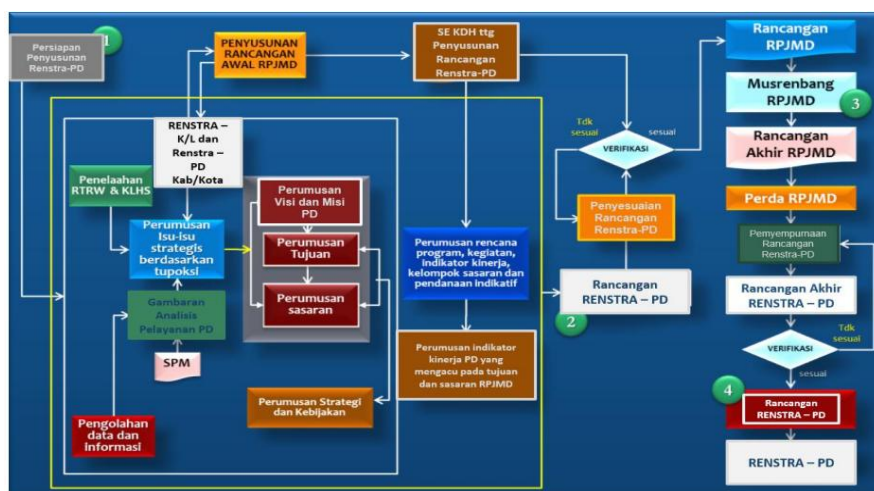
Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang terarah, efektif, dan efisien sehingga tujuan pembangunan jangka menengah dapat tercapai secara optimal. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam perencanaan dan pembangunan daerah memiliki peran strategis dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, termasuk Rencana Strategis (Renstra) yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah selama periode lima tahun kedepan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun

untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders Pembangunan dan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematika dan berkelanjutan.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1.



**Gambar 1.1.**

**Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah**

*Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017*

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, dijelaskan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan urusan fungsi penunjang perencanaan, fungsi penelitian dan pengembangan serta urusan pemerintahan bidang statistik.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Renstra Bappelitbangda) adalah dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya untuk masa waktu 5 (Lima) tahun ke depan. Renstra ini berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Renstra Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya selain mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti Renstra Kementerian PPN/Bappenas, Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat, RTRW dan sejumlah dokumen terkait lainnya. Selain itu, Renstra Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda setiap tahunnya hingga perencanaan tahun 2026. Program dan kegiatan tahun berkenaan dalam Renstra Bappelitbangda diuraikan dalam Renja Bappelitbangda.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 – 2029, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);

7. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

- Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
  22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;
  23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029;
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalata Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 4);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 12);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 6);
31. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 27 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029. Maksud Penyusunan Rencana Strategis (Renstra):

- a. Sebagai pedoman strategis Bappelitbangda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama periode lima tahun;
- b. Memberikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan sektor yang menjadi kewenangan Bappelitbangda, dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Kepulauan Tahun 2025–2029, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029; dan
- c. Menjamin keterpaduan pelaksanaan pembangunan lintas sektor, menjamin konsistensi perencanaan, pelaksanaan pengendalian, evaluasi program kegiatan, penganggaran dan pengelolaan kegiatan litbang, serta memperkuat akuntabilitas kinerja Bappelitbangda sebagai institusi yang memegang peran sentral dalam koordinasi dan perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

- a. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029 ke dalam arah kebijakan sektoral sesuai dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda;
- b. Menetapkan strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja untuk periode lima tahun ke depan;
- c. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta sebagai pedoman evaluasi kinerja perangkat daerah;
- d. Merumuskan Isu-isu strategis bappeda selama periode lima tahun kedepan;
- e. Meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan publik melalui perencanaan yang sistematis, terukur, partisipatif, dan berorientasi pada hasil pembangunan;
- f. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan nasional, serta antar-Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029 disusun secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen perencanaan daerah, khususnya sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Adapun sistematika penulisan Renstra ini terdiri dari beberapa bab yang memuat uraian sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Memuat secara ringkas tentang latar belakang penyusunan Renstra Bappelitbangda, fungsi Renstra Bappelitbangda dalam penyelenggaraan Pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Bappelitbangda, keterkaitan Renstra Bappelitbangda dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan Renja Bappelitbangda.

### **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Bappelitbangda.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Memuat sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra Bappelitbangda.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPELITBANGDA**

### **2.1. Gambaran Pelayanan Bappelitbangda**

#### **a. Tugas, Fungsi dan Struktur Bappelitbangda**

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Bappelitbangda, struktur organisasi Bappelitbangda, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Bappelitbangda. Uraian tentang struktur organisasi Bappelitbangda ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Bappelitbangda (proses, prosedur, mekanisme).

**b. Sumber Daya Bappelitbangda**

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Bappelitbangda dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

**c. Kinerja Pelayanan Bappelitbangda**

Bagian ini menunjukkan Tingkat capaian kinerja Bappelitbangda berdasarkan sasaran/target Renstra Bappelitbangda periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Bappelitbangda dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

**d. Kelompok Sasaran Pelayanan**

**2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Bappelitbangda**

**a. Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda**

Rumusan permasalahan merupakan kesenjangan antara realita/capaian Pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

**b. Isu Strategis**

Identifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi Bappelitbangda baik secara langsung ataupun tidak langsung.

**BAB III TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

**3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Bappelitbangda Tahun 2025-2029**

Pada bagian memuat tentang rumusan tujuan dan sasaran Renstra yang akan dicapai oleh Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya. selama periode 2025–2029. Penetapan tujuan dan sasaran tersebut didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan daerah, serta berpedoman pada sasaran RPJMD 2025–2029.

### **3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Bappelitbangda dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Bappelitbangda Tahun 2025-2029**

Pada bab ini juga memuat rumusan pernyataan arah kebijakan dan strategi Bappelitbangda dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029.

## **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Pada bagian ini mengemukakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output. Program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

### **4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Bappelitbangda yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappelitbangda dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator tersebut terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKU merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Bappelitbangda. Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi.

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029 disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan selaras dengan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029. Renstra ini menjadi pedoman pelaksanaan

pembangunan, penyusunan rencana kerja tahunan, serta dasar pengendalian dan evaluasi kinerja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya.

### **5.2. Kaidah Pelaksanaan**

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029.

### **5.3. Pedoman Transisi**

Dalam penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya diperlukan pedoman transisi sebagai instrumen pengarah untuk menjamin kesinambungan, konsistensi, dan stabilitas penyelenggaraan fungsi perencanaan pembangunan daerah pada masa peralihan kebijakan perencanaan.

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**  
**BAPPELITBANGDA**

**2.1. Gambaran Pelayanan Bappelitbangda**

**2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Bappelitbangda**

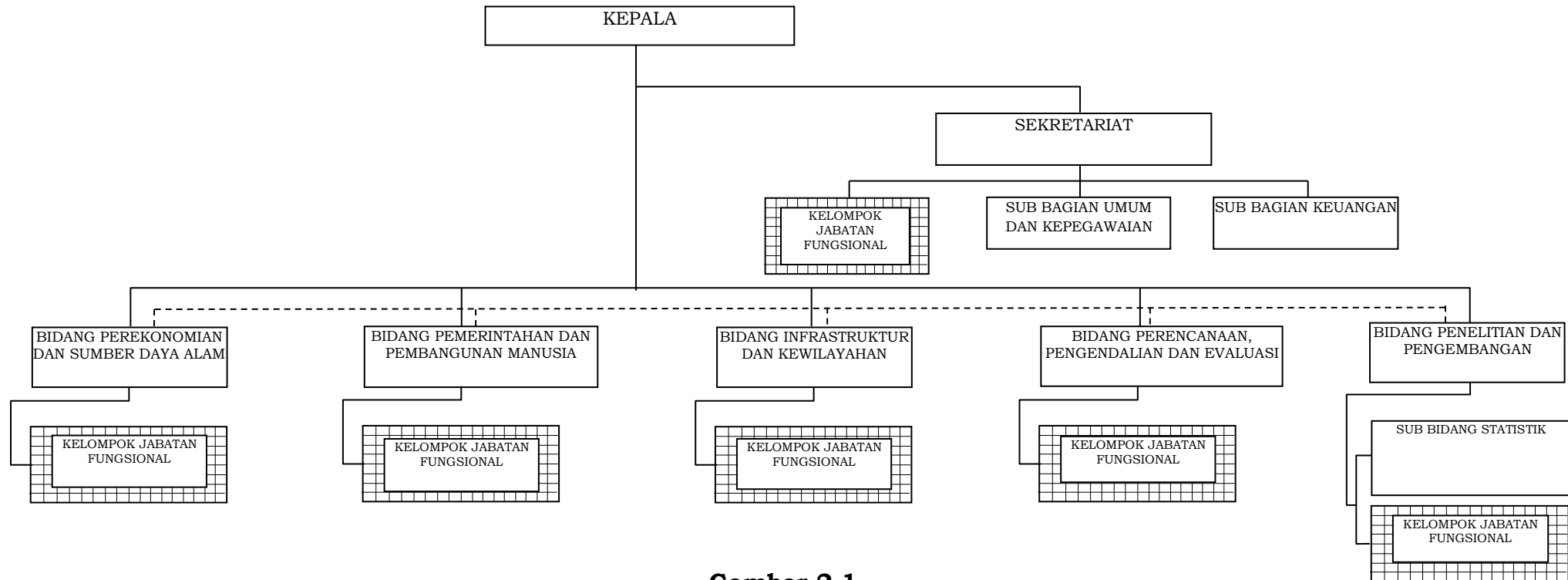
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah melaksanakan urusan fungsi penunjang perencanaan, fungsi penelitian dan pengembangan serta urusan pemerintahan bidang statistik.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. terdiri dari :

- A. Kepala;
- B. Sekretariat, terdiri atas:
  - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - 2. Subbagian Keuangan.
  - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- C. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas:
  - 1. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
  - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- D. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas:
  - 1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
  - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.

- E. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas:
  - 1. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
  - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- F. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, terdiri atas:
  - 1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi.
  - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- G. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas:
  - 1. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.
  - 2. Subbidang Statistik.
  - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan organisasi tersebut secara lengkap dapat terlihat pada gambar berikut.



**Gambar 2.1.**  
**Struktur Organisasi Bappelitbangda**

*Sumber : Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.*

Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 63 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, berikut rincian tugas dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya :

**A. Kepala Badan**

**a. Tugas Pokok**

Memimpin, mengatur, membina dan mengoordinasikan penyelenggaraan tugas pokok Badan meliputi urusan kesekretariatan, perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan daerah dan statistik.

**b. Fungsi**

- 1) Penyelenggaraan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- 2) Penyelenggaraan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- 3) Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- 4) Penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah;
- 5) Penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan urusan statistik; dan
- 6) Penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan.

**c. Rincian Tugas**

- 1) Menyelenggarakan penetapan rencana kerja Badan;
- 2) Menyelenggarakan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan lainnya;
- 3) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- 4) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi rencana perangkat daerah;
- 5) Menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana

- pembangunan daerah dan hasil rencana pembangunan daerah;
- 6) Menyelenggarakan dan mengoordinasikan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, bidang sosial dan kependudukan serta bidang ekonomi dan pembangunan;
  - 7) Menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengembangan inovasi daerah;
  - 8) Menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan statistik dengan Dinas atau Badan dan lembaga lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
  - 9) Menyelenggarakan urusan kesekretariatan meliputi perencanaan, pengelolaan keuangan serta umum dan kepegawaian di lingkungan badan perencanaan pembangunan daerah;
  - 10) Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka tugas pokok dan fungsi badan; dan
  - 11) Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **B. Sekretariat**

### **a. Tugas Pokok**

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Badan.

### **b. Fungsi**

- 1) Penyelenggaraan koordinasi perencanaan Badan;
- 2) Penyelenggaraan pengelolaan keuangan; dan
- 3) Penyelenggaraan pengelolaan umum dan kepegawaian.

### **c. Rincian Tugas**

- 1) Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- 2) Menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
- 3) Menyelenggarakan penyusunan perencanaan Badan;
- 4) Menyelenggarakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan Badan;
- 5) Menyelenggarakan pengelolaan dan pengendalian administrasi belanja dan keuangan Badan;
- 6) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- 7) Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- 8) Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, naskah dinas dan kearsipan;
- 9) Menyelenggarakan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan keprotokolan;
- 10) Menyelenggarakan pengelolaan informasi publik dan hubungan masyarakat;
- 11) Menyelenggarakan koordinasi pengukuran kinerja badan dan individu;
- 12) Menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional;
- 13) Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
- 14) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- 15) Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

##### **a. Tugas Pokok**

Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah

tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Badan.

**b. Rincian Tugas**

- 1) Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
- 3) Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
- 4) Melaksanakan pengelolaan dan penyimpanan barang milik Daerah;
- 5) Melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
- 6) Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan, informasi publik dan hubungan masyarakat;
- 7) Melaksanakan pengelolaan naskah produk hukum;
- 8) Melaksanakan koordinasi pembinaan, penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur tiap-tiap unit kerja;
- 9) Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data kepegawaian dinas;
- 10) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai, peningkatan kesejahteraan pegawai dan pengembangan karir pegawai;
- 11) Melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
- 12) Melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
- 13) Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan

14) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Sub Bagian Keuangan**

### **a. Tugas Pokok**

Melaksanakan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.

### **b. Rincian Tugas**

- 1) Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis lingkup Subbagian Keuangan;
- 2) Melaksanakan koordinasi penyusunan dan penyiapan anggaran Badan;
- 3) Melaksanakan penatausahaan keuangan Badan;
- 4) Melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
- 5) Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- 6) Melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Badan;
- 7) Melaksanakan perbendaharaan keuangan;
- 8) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
- 9) Melaksanakan verifikasi keuangan;
- 10) Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- 11) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **C. BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM**

### **a. Tugas Pokok**

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam meliputi

tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, perindustrian, transmigrasi dan keuangan.

**b. Fungsi**

- 1) Penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- 2) Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam; dan
- 3) Penyelenggaraan koordinasi penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam untuk penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya.

**c. Rincian Tugas**

1. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
2. Menyelenggarakan koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam dengan perangkat daerah dan lembaga lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
3. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang perekonomian dan sumber daya alam untuk bahan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
4. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen rencana strategis perangkat daerah dan rencana

- kerja perangkat daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
5. Menyelenggarakan analisis data dan informasi pembangunan daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam untuk penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan lainnya;
  6. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada perangkat daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  7. Menyelenggarakan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  8. Menyelenggarakan penyusunan bahan evaluasi perumusan kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil RPJMD dan RKPD lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  9. Menyelenggarakan koordinasi serta analisis usulan program dan kegiatan prioritas untuk perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  10. Menyelenggarakan analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi);
  11. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
  12. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **D. BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA**

### **a. Tugas Pokok**

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia meliputi pendidikan, kesehatan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, perencanaan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengawasan serta kesatuan bangsa dan politik.

### **b. Fungsi**

- 1) Penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- 2) Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
- 3) Penyelenggaraan koordinasi penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia untuk penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya.

### **c. Rincian Tugas**

- 1) Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- 2) Menyelenggarakan koordinasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan perangkat daerah dan lembaga lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- 3) Menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia untuk bahan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
- 4) Menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- 5) Menyelenggarakan analisis data dan informasi di bidang perekonomian untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, RKPD) lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- 6) Menyelenggarakan koordinasi pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- 7) Menyelenggarakan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- 8) Menyelenggarakan penyusunan bahan evaluasi perumusan kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil RPJMD dan RKPD lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

- 9) Menyelenggarakan koordinasi serta analisis usulan program dan kegiatan prioritas untuk perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- 10) Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- 11) Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **E. BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

### **a. Tugas Pokok**

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan meliputi sektor jalan dan jembatan, sumber daya air, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian, kewilayahan, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman, prasarana sarana dan utilitas umum serta penanggulangan bencana.

### **b. Fungsi**

- 1) Penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- 2) Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan; dan
- 3) Penyelenggaraan koordinasi penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan untuk penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya.

### **c. Rincian Tugas**

- 1) Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- 2) Menyelenggarakan koordinasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan dengan perangkat daerah dan lembaga lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- 3) Menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahan untuk bahan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
- 4) Menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- 5) Menyelenggarakan analisis data dan informasi di bidang perekonomian untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, RKPD) lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- 6) Menyelenggarakan koordinasi pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada perangkat daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- 7) Menyelenggarakan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- 8) Menyelenggarakan penyusunan bahan evaluasi perumusan kebijakan penyusunan, pelaksanaan

- dan hasil RPJMD dan RKPD lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- 9) Menyelenggarakan koordinasi serta analisis usulan program dan kegiatan prioritas untuk perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - 10) Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
  - 11) Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **F. BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

### **a. Tugas Pokok**

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.

### **b. Fungsi**

- 1) Penyelenggaraan koordinasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- 2) Penyelenggaraan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- 3) Penyelenggaraan koordinasi pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;

### **c. Rincian Tugas**

- 1) Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;
- 2) Menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- 3) Menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) melalui pengintegrasian perencanaan

pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan;

- 4) Menyelenggarakan pengelolaan dan analisis data dan informasi pembangunan daerah
- 5) Menyelenggarakan koordinasi, harmonisasi, dan sinergi perencanaan daerah dengan perencanaan pemerintah provinsi dan pusat;
- 6) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan musrenbang penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD;
- 7) Menyelenggarakan koordinasi pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
- 8) Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi; dan
- 9) Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **G. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

### **a. Tugas Pokok**

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah secara mandiri dan bersinergi bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, bidang sosial dan kependudukan, bidang ekonomi dan pembangunan, serta pengembangan inovasi dan teknologi serta menyelenggarakan urusan statistik.

### **b. Fungsi**

- 1) Penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan pembangunan daerah, serta statistik sektoral;

- 2) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah serta pengembangan inovasi dan teknologi;
- 3) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah, serta pengelolaan statistik sektoral;
- 4) Penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah, serta pengelolaan statistik sektoral;

**c. Rincian Tugas**

- 1) Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- 2) Menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis, program serta anggaran penelitian dan pengembangan daerah serta statistik sektoral;
- 3) Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, bidang sosial dan kependudukan, bidang ekonomi dan pembangunan, serta pengembangan inovasi dan teknologi;
- 4) Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta statistik sektoral;
- 5) Menyelenggarakan pengelolaan statistik sektoral;
- 6) Menyelenggarakan pelaksanaan identifikasi, publikasi, desiminasi, promosi dan apresiasi inovasi daerah;
- 7) Menyelenggarakan diseminasi hasil penelitian dan pembangunan daerah;
- 8) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan harmonisasi kegiatan dengan Kementerian,

Lembaga, Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten; dan

- 9) Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **1. Sub Bidang Statistik**

### **a. Tugas Pokok**

Melaksanakan penyiapan, pengumpulan, pengolahan, dan analisis data statistik sektoral.

### **b. Rincian Tugas**

- 1) Melaksanakan bahan perencanaan lingkup Subbidang Statistik;
- 2) Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Sub Bidang Statistik;
- 3) Melaksanakan penyiapan, pengumpulan, pengolahan, dan analisis data statistik sektoral;
- 4) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral;
- 5) Melaksanakan identifikasi kebutuhan data sektoral;
- 6) Melaksanakan publikasi dan diseminasi data statistik sektoral;
- 7) Melaksanakan implementasi rancangan pengumpulan data Survei;
- 8) Melaksanakan penyusunan metadata statistik sektoral;
- 9) Melaksanakan pengelolaan bank data;
- 10) Melaksanakan pengembangan sistem penyajian data dan informasi statistik daerah;
- 11) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan survei data statistik sektoral oleh perangkat daerah;
- 12) Melaksanakan pembinaan terhadap pengelola statistik sektoral di perangkat daerah;

- 13) Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Statistik; dan
- 14) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **H. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 63 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, mengenai rincian tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **2.1.2. Sumber Daya Bappelitbangda**

Sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha.

Sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam menjalankan roda organisasi. Kemajuan perkembangan zaman diikuti dengan meningkatnya tuntutan masyarakat atas pelayanan dari pemerintah, sehingga dibutuhkan aparatur atau sumber daya manusia yang berkualitas.

Perencanaan pembangunan daerah menjadi awal penentu keberhasilan dalam pencapaian tujuan daerah. Dengan berbagai perubahan dalam tatanan organisasi, aparatur perencana dituntut responsif atas kondisi dan permasalahan yang terjadi di daerah untuk dijadikan bahan perencanaan yang berkualitas.

Berdasarkan data kepegawaian per 1 Agustus 2025, Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya memiliki 40 orang PNS yang terdiri dari 24 orang laki-laki dan 16 orang perempuan. Jumlah tersebut tidak termasuk Tenaga Kerja

Kontrak (TKK). Adapun rincian jumlah pegawai berdasarkan Status Kepegawaian di Bappelitbangda adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.1.**  
**Jumlah Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya**  
**Tahun 2025 Berdasarkan Status Kepegawaian**

No	Status Kepegawaian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	24	16	40
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)	3	2	5
3	Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	-	3	3
4	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu	8	-	8
<b>Jumlah Total</b>		<b>35</b>	<b>21</b>	<b>56</b>

*Sumber : Hasil Analisis Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Desember 2025.*

Melalui tabel tersebut dapat terlihat bahwa jumlah pegawai terbanyak berada di Sekretariat, sebagai unit penunjang dalam aktivitas organisasi di Bappelitbangda. Sedangkan pada unit lainnya masih belum memadai dalam segi kuantitas.

Adapun ketersediaan jumlah pegawai didasarkan pada jumlah jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 800/KEP.138/Org/2020 Tentang Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah sebesar 58 %. Rincian kebutuhan pegawai tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.2.**  
**Jumlah Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya**  
**Tahun 2025 Berdasarkan Jabatan**

No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1	0	1
2	Jabatan Administrator	6	3	9

3	Jabatan Fungsional	8	6	14
4	Jabatan Pelaksana	20	12	32
<b>Jumlah Total</b>		<b>35</b>	<b>21</b>	<b>56</b>

*Sumber : Hasil Analisis Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Desember 2025.*

Dari table berikut dapat terlihat bahwa jabatan terbanyak adalah Pelaksana, Meskipun dari segi kuantitas belum memadai, akan tetapi tingkat jabatan Fungsional di lingkungan Bappelitbangda dapat dikatakan cukup tinggi. sedangkan sisanya merupakan jabatan Administrator dan Pimpinan Tinggi Pratama. Dengan demikian, hal tersebut menjadi salah satu kekuatan dalam membentuk aparatur yang berkualitas.

#### **Sarana dan Prasarana/Aset Bappelitbangda**

Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya menempati gedung kantor yang berdiri di atas lahan seluas 3.4760 m<sup>2</sup> milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang berada di Kompleks Perkantoran Jalan Sukapura III Singaparna sejak tahun 2012.

Secara umum kondisi prasarana gedung kantor Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya sudah memadai, dengan lokasi kantor yang strategis dan kondisi gedung yang baik. Kondisi ruangan kerja pegawai dapat dikatakan nyaman dengan luas ruangan yang cukup dan kelengkapan ruangan kerja yang memadai.

Selain ruangan kerja pegawai, fasilitas lain yang dimiliki oleh Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya sebagai fasilitas penunjang utama adalah 3 (tiga) ruangan rapat, yakni Aula Wiradadaha, Aula Wiratanuningrat dan Aula Wiratanubaya dengan daya tampung peserta yang berbeda-beda sehingga dapat menyesuaikan dengan skala rapat atau pertemuan yang diselenggarakan.

Kelengkapan masing-masing ruangan rapat tersebut telah dilengkapi sesuai kebutuhan. Ketersediaan ruangan rapat tersebut menjadi penting, mengingat peran Bappelitbangda sebagai koordinator dan fasilitator dalam urusan perencanaan yang memerlukan tempat yang memadai dalam berbagai pelaksanaan kegiatan. Selain pihak internal, ruangan rapat tersebut dapat dipinjam oleh pihak internal yang membutuhkan dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Adapun rincian sarana yang menjadi aset Bappelitbangda, berdasarkan daftar aset tetap adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.3.**  
**Sarana dan Prasarana Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya**  
**Tahun 2025**

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah	Satuan	Kondisi (Baik/RR/RB)*	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Bangunan Gedung Permanen	Prasarana	1	Unit	Baik	2012	Ruang Kerja	Digunakan aktif
2	Kendaraan Dinas Roda Empat	Sarana	1	Unit	Baik	2024	Sekretaris	Digunakan aktif
3	Kendaraan Dinas Roda Empat	Sarana	1	Unit	Baik	2009	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Digunakan aktif
4	Kendaraan Dinas Roda Empat	Sarana	1	Unit	Baik	2009	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Digunakan aktif
5	Kendaraan Dinas Roda Empat	Sarana	1	Unit	Baik	2009	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Digunakan aktif
6	Kendaraan Dinas Roda Empat	Sarana	1	Unit	Baik	2007	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Digunakan aktif
7	Kendaraan Dinas Roda Empat	Sarana	1	Unit	Baik	2009	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Digunakan aktif
8	Kendaraan Dinas Roda Empat	Sarana	1	Unit	Baik	2002	Sekretariat	Digunakan aktif
9	Kendaraan Dinas Roda Dua	Sarana	1	Unit	Baik	2019	Sekretariat	Digunakan aktif
10	Kendaraan Dinas Roda Dua	Sarana	1	Unit	Baik	2019	Sekretariat	Digunakan aktif
11	Kendaraan Dinas Roda Dua	Sarana	1	Unit	Baik	2019	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Digunakan aktif
12	Kendaraan Dinas Roda Dua					2019	Sekretariat	Digunakan aktif

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah	Satuan	Kondisi (Baik/RR/RB)*	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13	Kendaraan Dinas Roda Dua	Sarana	1	Unit	Baik	2019	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Digunakan aktif
14	Kendaraan Dinas Roda Dua	Sarana	1	Unit	Baik	2019	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Digunakan aktif
15	Kendaraan Dinas Roda Dua	Sarana	1	Unit	Baik	2015	Sekretariat	Digunakan aktif
16	Kendaraan Dinas Roda Dua	Sarana	1	Unit	Baik	2015	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Digunakan aktif
17	Kendaraan Dinas Roda Dua	Sarana	1	Unit	Baik	2015	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Digunakan aktif
18	Kendaraan Dinas Roda Dua	Sarana	1	Unit	Baik	2015	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Digunakan aktif
19	Kendaraan Dinas Roda Dua	Sarana	1	Unit	Baik	2015	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Digunakan aktif
20	Kendaraan Dinas Roda Dua	Sarana	1	Unit	Baik	2016	Sekretariat	Digunakan aktif
21	Kendaraan Dinas Roda Dua	Sarana	1	Unit	Baik	2012	Sekretariat	Digunakan aktif
22	Kendaraan Dinas Roda Dua	Sarana	1	Unit	Baik	2006	Sekretariat	Digunakan aktif
23	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2014	Sekretariat	Digunakan aktif
24	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2016	Sekretariat	Digunakan aktif
25	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2016	Sekretariat	Digunakan aktif
26	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2016	Sekretariat	Digunakan aktif
27	Tablet	Sarana	1	Unit	Baik	2019	Sekretariat	Digunakan aktif
28	Tablet	Sarana	1	Unit	Baik	2020	Sekretariat	Digunakan aktif

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah	Satuan	Kondisi (Baik/RR/RB)*	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
29	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2020	Sekretariat	Digunakan aktif
30	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2020	Sekretariat	Digunakan aktif
31	Notebook	Sarana	1	Unit	Baik	2022	Sekretariat	Digunakan aktif
32	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2022	Sekretariat	Digunakan aktif
33	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2022	Sekretariat	Digunakan aktif
34	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2022	Sekretariat	Digunakan aktif
35	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2022	Sekretariat	Digunakan aktif
36	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2022	Sekretariat	Digunakan aktif
37	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2023	Sekretariat	Digunakan aktif
38	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2023	Sekretariat	Digunakan aktif
39	Tablet	Sarana	1	Unit	Baik	2024	Sekretariat	Digunakan aktif
40	iPad	Sarana	1	Unit	Baik	2024	Sekretariat	Digunakan aktif
41	HP	Sarana	1	Unit	Baik	2019	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Digunakan aktif
42	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2020	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Digunakan aktif
43	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2020	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Digunakan aktif
44	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2020	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Digunakan aktif
45	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2020	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Digunakan aktif

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah	Satuan	Kondisi (Baik/RR/RB)*	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
46	HP Envy	Sarana	1	Unit	Baik	2020	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Digunakan aktif
47	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2022	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Digunakan aktif
48	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2022	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Digunakan aktif
49	iPad	Sarana	1	Unit	Baik	2023	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Digunakan aktif
50	Mac Book	Sarana	1	Unit	Baik	2023	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Digunakan aktif
51	Tablet	Sarana	1	Unit	Baik	2020	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Digunakan aktif
52	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2020	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Digunakan aktif
53	HP	Sarana	1	Unit	Baik	2020	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Digunakan aktif
54	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2020	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Digunakan aktif
55	Notebook	Sarana	1	Unit	Baik	2022	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Digunakan aktif
56	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2022	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Digunakan aktif

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah	Satuan	Kondisi (Baik/RR/RB)*	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
57	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2022	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Digunakan aktif
58	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2023	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Digunakan aktif
59	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2017	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Digunakan aktif
60	Perangkat Komputer	Sarana	1	Unit	Baik	2019	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Digunakan aktif
61	Perangkat Komputer	Sarana	1	Unit	Baik	2019	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Digunakan aktif
62	Perangkat Komputer	Sarana	1	Unit	Baik	2019	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Digunakan aktif
63	Tablet	Sarana	1	Unit	Baik	2020	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Digunakan aktif
64	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2020	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Digunakan aktif
65	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2020	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Digunakan aktif
66	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2022	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Digunakan aktif
67	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2022	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Digunakan aktif

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah	Satuan	Kondisi (Baik/RR/RB)*	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
68	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2022	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Digunakan aktif
69	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2015	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Digunakan aktif
70	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2016	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Digunakan aktif
71	Tablet	Sarana	1	Unit	Baik	2020	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Digunakan aktif
72	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2020	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Digunakan aktif
73	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2020	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Digunakan aktif
74	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2020	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Digunakan aktif
75	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2020	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Digunakan aktif
76	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2020	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Digunakan aktif
77	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2024	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Digunakan aktif
78	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2021	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Digunakan aktif

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah	Satuan	Kondisi (Baik/RR/RB)*	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
79	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2021	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Digunakan aktif
80	Mac Book	Sarana	1	Unit	Baik	2023	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Digunakan aktif
81	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2023	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Digunakan aktif
82	Perangkat Komputer	Sarana	1	Unit	Baik	2023	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Digunakan aktif
83	Transportable Generating Set	Sarana	1	Unit	Baik	2021	Sekretariat	Digunakan aktif
84	Portable Generating Set	Sarana	1	Unit	Baik	2015	Sekretariat	Digunakan aktif
85	Stationary Generating Set	Sarana	1	Unit	Baik	2019	Sekretariat	Digunakan aktif
86	Global Positioning System	Sarana	1	Unit	KB	2010	Sekretariat	Digunakan aktif
87	Global Positioning System	Sarana	1	Unit	KB	2011	Sekretariat	Digunakan aktif
88	Global Positioning System	Sarana	1	Unit	Baik	2012	Sekretariat	Digunakan aktif
89	Global Positioning System	Sarana	3	Unit	Baik	2015	Sekretariat	Digunakan aktif
90	Mesin Ketik Manual Portable	Sarana	1	Unit	Baik	2004	Sekretariat	Digunakan aktif
91	Mesin Ketik Listrik	Sarana	1	Unit	Baik	2015	Ruang Kerja	Digunakan aktif
92	Mesin Penghitung Uang	Sarana	1	Unit	Baik	2017	Ruang Kerja	Digunakan aktif
93	Lemari Kayu	Sarana	1	Buah	Baik	2003	Ruang Kerja	Digunakan aktif
94	Lemari Kayu	Sarana	21	Buah	Baik	2012	Ruang Kerja	Digunakan aktif
95	Lemari Kayu	Sarana	1	Buah	Baik	2015	Ruang Kerja	Digunakan aktif

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah	Satuan	Kondisi (Baik/RR/RB)*	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
96	Lemari Kayu	Sarana	2	Buah	Baik	2016	Ruang Kerja	Digunakan aktif
97	Lemari Kayu	Sarana	4	Buah	Baik	2020	Ruang Kerja	Digunakan aktif
98	Lemari Kayu	Sarana	1	Buah	Baik	2021	Ruang Kerja	Digunakan aktif
99	Rak Besi	Sarana	7	Buah	Baik	2007	Ruang Kerja	Digunakan aktif
100	Rak Besi	Sarana	1	Buah	Baik	2015	Ruang Kerja	Digunakan aktif
101	Filing Cabinet Besi	Sarana	2	Buah	Baik	2007	Ruang Kerja	Digunakan aktif
102	Filing Cabinet Besi	Sarana	3	Buah	Baik	2010	Ruang Kerja	Digunakan aktif
103	Filing Cabinet Besi	Sarana	3	Buah	Baik	2013	Ruang Kerja	Digunakan aktif
104	Filing Cabinet Besi	Sarana	3	Buah	Baik	2015	Ruang Kerja	Digunakan aktif
105	Filing Cabinet Besi	Sarana	5	Buah	Baik	2019	Ruang Kerja	Digunakan aktif
106	CCTV	Sarana	2	Unit	Baik	2021	Ruang Kerja	Digunakan aktif
107	CCTV	Sarana	1	Unit	Baik	2022	Ruang Kerja	Digunakan aktif
108	Papan Visual/Papan Nama	Sarana	1	Unit	Baik	2022	Ruang Kerja	Digunakan aktif
109	Alat Penghancur Kertas	Sarana	1	Unit	Baik	2014	Ruang Kerja	Digunakan aktif
110	Alat Penghancur Kertas	Sarana	1	Unit	Baik	2015	Ruang Kerja	Digunakan aktif
111	Alat Penghancur Kertas	Sarana	3	Unit	Baik	2015	Ruang Kerja	Digunakan aktif
112	Alat Penghancur Kertas	Sarana	2	Unit	Baik	2016	Ruang Kerja	Digunakan aktif
113	Alat Penghancur Kertas	Sarana	1	Unit	Baik	2017	Ruang Kerja	Digunakan aktif
114	Mesin Absensi	Sarana	1	Unit	Baik	2013	Ruang Kerja	Digunakan aktif
115	LCD Projector/Infocus	Sarana	1	Unit	Baik	2015	Ruang Rapat	Digunakan aktif
116	LCD Projector/Infocus	Sarana	1	Unit	Baik	2019	Ruang Rapat	Digunakan aktif

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah	Satuan	Kondisi (Baik/RR/RB)*	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
117	LCD Projector/Infocus	Sarana	1	Unit	Baik	2021	Ruang Rapat	Digunakan aktif
118	Pintu Elektrik	Prasarana	13	Unit	Baik	2020	Ruang Kerja & Ruang Rapat	Digunakan aktif
119	Layar LCD Projector	Sarana	2	Buah	Baik	2010	Ruang Rapat	Digunakan aktif
120	Layar LCD Projector	Sarana	2	Buah	Baik	2013	Ruang Rapat	Digunakan aktif
121	Meja Kerja Kayu	Sarana	6	Buah	Baik	2016	Ruang Kerja	Digunakan aktif
122	Kursi Besi/Metal	Sarana	4	Buah	Baik	2016	Ruang Kerja	Digunakan aktif
123	Meja Rapat	Sarana	2	Buah	Baik	2012	Ruang Kerja	Digunakan aktif
124	Meja Rapat	Sarana	7	Buah	Baik	2015	Ruang Rapat	Digunakan aktif
125	Meja Rapat	Sarana	1	Buah	Baik	2022	Ruang Rapat	Digunakan aktif
126	Meja Rapat	Sarana	8	Buah	Baik	2024	Ruang Rapat	Digunakan aktif
127	Meja Podium	Sarana	1	Buah	Baik	2012	Ruang Rapat	Digunakan aktif
128	Meja Podium	Sarana	1	Buah	Baik	2013	Ruang Rapat	Digunakan aktif
129	Meja Resepsionis	Sarana	1	Buah	Baik	2015	Ruang Resepsionis	Digunakan aktif
130	Meja Panjang	Sarana	8	Buah	Baik	2013	Ruang Rapat	Digunakan aktif
131	Meja Bundar	Sarana	1	Buah	Baik	2015	Ruang Rapat	Digunakan aktif
132	Meja 1/2 Biro	Sarana	1	Buah	Baik	2024	Ruang Rapat	Digunakan aktif
133	Kasur/Spring Bed	Sarana	1	Buah	Baik	2015	Posko Pelayanan Kesehatan	Digunakan aktif
134	Kursi Tamu	Sarana	1	Buah	Baik	2015	Ruang Kerja	Digunakan aktif
135	Kursi Tamu	Sarana	1	Buah	Baik	2016	Ruang Kerja	Digunakan aktif
136	Kursi Putar	Sarana	5	Buah	Baik	2021	Ruang Kerja	Digunakan aktif
137	Bangku Tunggu	Sarana	1	Buah	Baik	2015	Ruang Kerja	Digunakan aktif

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah	Satuan	Kondisi (Baik/RR/RB)*	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
138	Bangku Tunggu	Sarana	4	Buah	Baik	2016	Ruang Kerja	Digunakan aktif
139	Bangku Tunggu	Sarana	2	Buah	Baik	2023	Ruang Kerja	Digunakan aktif
140	Partisi	Prasarana	1	Paket	Baik	2021	Ruang Kerja & Ruang Rapat	Digunakan aktif
141	Sofa	Sarana	3	Set	Baik	2012	Ruang Kerja	Digunakan aktif
142	Sofa	Sarana	1	Set	Baik	2016	Ruang Kerja & Ruang Rapat	Digunakan aktif
143	Sofa	Sarana	1	Set	Baik	2020	Ruang Kerja	Digunakan aktif
144	Sofa	Sarana	1	Set	Baik	2021	Ruang Kerja & Ruang Rapat	Digunakan aktif
145	Vacuum Cleaner	Sarana	1	Unit	Baik	2022	Sekretariat	Digunakan aktif
146	Mesin Pemotong Rumput	Sarana	1	Unit	Baik	2010	Sekretariat	Digunakan aktif
147	Mesin Pemotong Rumput	Sarana	1	Unit	Baik	2022	Sekretariat	Digunakan aktif
148	Mesin Pemotong Rumput	Sarana	1	Unit	Baik	2023	Sekretariat	Digunakan aktif
149	Lemari Es	Sarana	4	Unit	Baik	2014	Ruang Kerja	Digunakan aktif
150	A.C.	Sarana	37	Unit	Baik	2012	Ruang Kerja & Ruang Rapat	Digunakan aktif
151	A.C.	Sarana	3	Unit	Baik	2022	Ruang Kerja & Ruang Rapat	Digunakan aktif
152	Portable Air Conditioner	Sarana	1	Unit	Baik	2023	Ruang Kerja & Ruang Rapat	Digunakan aktif
153	Exhause Fan	Sarana	3	Unit	Baik	2018	Ruang Kerja & Ruang Rapat	Digunakan aktif
154	Televisi	Sarana	4	Unit	Baik	2014	Ruang Kerja & Ruang Rapat	Digunakan aktif
155	Televisi	Sarana	10	Unit	Baik	2020	Ruang Kerja & Ruang Rapat	Digunakan aktif
156	Amplifier TOA	Sarana	10	Unit	Baik	2021	Ruang Kerja & Ruang Rapat	Digunakan aktif
157	Sound System	Sarana	5	Unit	Baik	2013	Ruang Kerja & Ruang Rapat	Digunakan aktif
158	Microphone Table	Sarana	2	Unit	Baik	2016	Ruang Rapat	Digunakan aktif

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah	Satuan	Kondisi (Baik/RR/RB)*	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
159	Stabilisator Matsuyama	Sarana	1	Unit	Baik	2019	Ruang Rapat	Digunakan aktif
160	Camera Video	Sarana	1	Unit	Baik	2015	Sekretariat	Digunakan aktif
161	Camera Video	Sarana	1	Unit	Baik	2015	Sekretariat	Digunakan aktif
162	Camera Video	Sarana	1	Unit	Baik	2016	Sekretariat	Digunakan aktif
163	Camera Video	Sarana	1	Unit	Baik	2017	Sekretariat	Digunakan aktif
164	Camera Video	Sarana	1	Unit	Baik	2018	Sekretariat	Digunakan aktif
165	Camera Video	Sarana	1	Unit	Baik	2019	Sekretariat	Digunakan aktif
166	Tustel Nikon	Sarana	1	Unit	Baik	2010	Sekretariat	Digunakan aktif
167	Tustel Nikon	Sarana	1	Unit	Baik	2011	Sekretariat	Digunakan aktif
168	Tustel Nikon	Sarana	4	Unit	Baik	2013	Sekretariat	Digunakan aktif
169	Tustel Nikon	Sarana	13	Unit	Baik	2014	Sekretariat	Digunakan aktif
170	Dispenser	Sarana	1	Unit	Baik	2024	Sekretariat	Digunakan aktif
171	Handy Cam	Sarana	2	Unit	Baik	2012	Sekretariat	Digunakan aktif
172	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Sarana	1	Buah	Baik	2020	Ruang Kerja	Digunakan aktif
173	Meja Kerja Pejabat lain-lain	Sarana	23	Buah	Baik	2012	Ruang Kerja	Digunakan aktif
174	Kursi Kerja Pegawai	Sarana	5	Buah	Baik	2024	Ruang Kerja	Digunakan aktif
175	Lemari Buku Arsip	Sarana	7	Buah	Baik	2021	Ruang Kerja	Digunakan aktif
176	Microphone/Wireless MIC	Sarana	26	Unit	Baik	2013	Ruang Kerja & Ruang Rapat	Digunakan aktif
177	Camera Electronic	Sarana	2	Unit	Baik	2015	Sekretariat	Digunakan aktif
178	Camera View Finder	Sarana	2	Unit	Baik	2019	Sekretariat	Digunakan aktif
179	Layar Film/Projector	Sarana	2	Unit	Baik	2010	Ruang Kerja & Ruang Rapat	Digunakan aktif

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah	Satuan	Kondisi (Baik/RR/RB)*	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
180	Layar Film/Projector	Sarana	1	Unit	Baik	2010	Ruang Kerja & Ruang Rapat	Digunakan aktif
181	Layar Film/Projector	Sarana	4	Unit	Baik	2013	Ruang Kerja & Ruang Rapat	Digunakan aktif
182	Layar Film/Projector	Sarana	3	Unit	Baik	2014	Ruang Kerja & Ruang Rapat	Digunakan aktif
183	Printer	Sarana	1	Unit	Baik	2010	Ruang Kerja	Digunakan aktif
184	Printer	Sarana	1	Unit	Baik	2012	Ruang Kerja	Digunakan aktif
185	Printer	Sarana	2	Unit	Baik	2013	Ruang Kerja	Digunakan aktif
186	Printer	Sarana	6	Unit	Baik	2014	Ruang Kerja	Digunakan aktif
187	Printer	Sarana	12	Unit	Baik	2015	Ruang Kerja	Digunakan aktif
188	Printer	Sarana	6	Unit	Baik	2016	Ruang Kerja	Digunakan aktif
189	Printer	Sarana	15	Unit	Baik	2017	Ruang Kerja	Digunakan aktif
190	Printer	Sarana	7	Unit	Baik	2019	Ruang Kerja	Digunakan aktif
191	Printer	Sarana	5	Unit	Baik	2020	Ruang Kerja	Digunakan aktif
192	Printer	Sarana	10	Unit	Baik	2021	Ruang Kerja	Digunakan aktif
193	Printer	Sarana	4	Unit	Baik	2022	Ruang Kerja	Digunakan aktif

Sumber : Hasil Analisis Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya 2025.

Dengan ditambahkannya urusan penelitian dan pengembangan serta statistik, maka perlu diidentifikasi ulang kebutuhan sarana prasarana di Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya agar lebih efektif dan efisien. Selain itu, sarana dan prasarana yang telah ada perlu pemeliharaan secara berkala agar kondisinya tetap baik.

### **2.1.3. Kinerja Pelayanan Bappelitbangda**

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir Bappelitbangda telah melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana strategis Bappelitbangda, dengan pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tabel 2.4. berikut :

**Tabel 2.4.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**  
**Kabupaten Tasikmalaya**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda				0	53 Poin	56 Poin	60 Poin	78,70 Poin	0	N/A	59,41 Poin	78,65 Poin	89,10 Poin	0	0	1,06	1,31	1,13
2	Nilai Perencanaan Kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten				0	23,75 Poin	24,05 Poin	21,70 Poin	21,80 Poin	0	23,45 Poin	21,64 Poin	21,80 Poin	21,87 Poin	0	0,99	0,90	1,00	1,00
3	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder				0	100%	100%	100%	100%	0	N/A	100%	100%	100%	0	0	100%	100%	100%
4	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral				0	71%	79%	88%	100%	0	71%	83,33%	90%	100%	0	100%	105,48%	102%	100%

Sumber : Hasil Analisis Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya 2025.

Realisasi Capaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2020 – 2024 selalu mencapai target yang telah ditetapkan pada Renstra Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya dengan rasio capaian kinerja 100% dari tahun ke tahun.

**Tabel 2.5.**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**  
**Kabupaten Tasikmalaya**

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>831.000.000</b>	<b>12.089.567.312</b>	<b>13.681.132.141</b>	<b>14.734.014.384</b>	<b>12.570.841.872</b>	<b>548.949.668</b>	<b>7.089.189.358</b>	<b>9.802.695.878</b>	<b>10.042.173.970</b>	<b>10.925.797.404</b>	<b>0,66</b>	<b>0,59</b>	<b>0,72</b>	<b>0,68</b>	<b>0,87</b>
<b>Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>0</b>	<b>330.210.000</b>	<b>310.000.000</b>	<b>316.200.000</b>	<b>322.524.000</b>	<b>0</b>	<b>125.118.950</b>	<b>128.602.292</b>	<b>129.728.000</b>	<b>241.882.135</b>	<b>0,00</b>	<b>0,38</b>	<b>0,41</b>	<b>0,41</b>	<b>0,75</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	150.000.000	150.000.000	153.000.000	156.060.000	0	67.642.950	86.360.292	89.728.000	146.944.884	0,00	0,45	0,58	0,59	0,94
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	100.210.000	80.000.000	81.600.000	83.232.000	0	42.651.600	0	0	0	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	80.000.000	80.000.000	81.600.000	83.232.000	0	14.824.400	42.242.000	40.000.000	94.937.251		0,19	0,53	0,49	1,14
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>0</b>	<b>6.905.750.564</b>	<b>8.080.000.000</b>	<b>8.241.600.000</b>	<b>8.406.432.000</b>	<b>0</b>	<b>4.606.646.119</b>	<b>6.875.337.525</b>	<b>6.995.305.123</b>	<b>6.914.864.066</b>	<b>0,00</b>	<b>0,67</b>	<b>0,85</b>	<b>0,85</b>	<b>0,82</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0	6.820.750.564	8.000.000.000	8.160.000.000	8.323.200.000	0	4.505.464.869	6.800.626.325	6.965.432.123	6.864.928.066	0,00	0,66	0,85	0,85	0,82
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	70.000.000	50.000.000	51.000.000	52.020.000	0	84.961.450	48.990.700	0	0	0,00	1,21	0,98	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	15.000.000	30.000.000	30.600.000	31.212.000	0	16.219.800	25.720.500	29.873.000	49.936.000	0,00	1,08	0,86	0,98	1,60
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>0</b>	<b>168.980.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>270.000.000</b>	<b>255.000.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	168.980.000	200.000.000	250.000.000	255.000.000	0	45.000.000	0	0	0	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>181.000.000</b>	<b>778.153.500</b>	<b>711.780.441</b>	<b>776.016.050</b>	<b>740.536.371</b>	<b>181.633.900</b>	<b>486.234.993</b>	<b>845.381.762</b>	<b>873.687.100</b>	<b>935.961.436</b>	<b>1,00</b>	<b>0,62</b>	<b>1,19</b>	<b>1,13</b>	<b>1,26</b>
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.000.000	60.000.000	60.000.000	61.200.000	62.424.000	48.286.900	32.263.200	84.557.320	94.656.950	184.473.000	0,86	0,54	1,41	1,55	2,96
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	75.000.000	52.513.500	50.000.000	51.000.000	52.020.000	63.582.000	30.431.100	42.864.750	57.998.400	64.708.900	0,85	0,58	0,86	1,14	1,24
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000	89.300.000	32.400.000	33.048.000	33.708.960	69.765.000	23.980.000	37.000.000	40.000.000	48.995.000	1,40	0,27	1,14	1,21	1,45
Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	110.780.000	80.029.000	81.629.580	83.262.172	0	56.804.000	80.027.750	87.945.000	87.719.835	0,00	0,51	1,00	1,08	1,05
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	465.560.000	489.351.441	499.138.470	509.121.239	0	342.756.693	600.931.942	543.086.750	550.064.701	0,00	0,74	1,23	1,09	1,08
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	0	-	50.000.000		0	0	0	50.000.000	0	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>0</b>	<b>2.233.354.000</b>	<b>2.400.000.000</b>	<b>3.111.259.600</b>	<b>787.031.992</b>	<b>0</b>	<b>502.108.000</b>	<b>287.559.300</b>	<b>202.725.000</b>	<b>652.340.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22</b>	<b>0,12</b>	<b>0,07</b>	<b>0,83</b>
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	1.325.904.000		1.552.590.000	457.450.000	0	0	0	0	347.950.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	457.450.000	1.900.000.000	738.060.000		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	450.000.000	500.000.000	323.119.600	329.581.992	0	502.108.000	287.559.300	202.725.000	154.900.000	0,00	1,12	0,58	0,63	0,47
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0		497.490.000		0	0	0	0	149.490.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>650.000.000</b>	<b>948.620.000</b>	<b>1.182.627.850</b>	<b>1.206.280.407</b>	<b>1.230.406.015</b>	<b>367.315.768</b>	<b>831.673.679</b>	<b>1.135.967.146</b>	<b>1.183.728.692</b>	<b>1.196.815.847</b>	<b>0,57</b>	<b>0,88</b>	<b>0,96</b>	<b>0,98</b>	<b>0,97</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	650.000.000	536.360.000	428.012.550	436.572.801	445.304.257	367.315.768	263.407.979	374.427.262	433.068.300	458.187.720	0,57	0,49	0,87	0,99	1,03
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	412.260.000	754.615.300	769.707.606	785.101.758	0	568.265.700	761.539.884	750.660.392	738.628.127	0,00	1,38	1,01	0,98	0,94
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>0</b>	<b>709.499.248</b>	<b>796.723.850</b>	<b>812.658.327</b>	<b>828.911.494</b>	<b>0</b>	<b>492.407.617</b>	<b>529.847.853</b>	<b>657.000.055</b>	<b>983.933.920</b>	<b>0,00</b>	<b>0,69</b>	<b>0,67</b>	<b>0,81</b>	<b>1,19</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	216.236.000	248.368.050	253.335.411	258.402.119	0	116.581.050	235.008.620	309.884.209	367.948.600	0,00	0,54	0,95	1,22	1,42
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	167.988.000	130.100.500	132.702.510	135.356.560	0	91.906.700	93.600.300	110.471.096	137.916.626	0,00	0,55	0,72	0,83	1,02
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	68.780.000	64.450.000	65.739.000	67.053.780	0	27.805.600	50.128.200	83.077.750	191.508.740	0,00	0,40	0,78	1,26	2,86
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	0	256.495.248	353.805.300	360.881.406	368.099.034	0	256.114.267	151.110.733	153.567.000	286.559.954	0,00	1,00	0,43	0,43	0,78

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
dan Bangunan Lainnya															
<b>Penataan Organisasi</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>	-	-	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	0	15.000.000	-			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>0</b>	<b>2.502.500.000</b>	<b>2.374.999.800</b>	<b>3.093.500.000</b>	<b>2.798.370.000</b>	<b>0</b>	<b>1.189.607.786</b>	<b>1.485.468.408</b>	<b>843.367.290</b>	<b>1.362.414.292</b>	<b>0,00</b>	<b>0,48</b>	<b>0,63</b>	<b>0,27</b>	<b>0,49</b>
<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000.000</b>	<b>1.225.000.000</b>	<b>1.454.000.000</b>	<b>1.483.080.000</b>	<b>0</b>	<b>687.887.511</b>	<b>815.215.796</b>	<b>694.246.592</b>	<b>1.154.563.532</b>	<b>0,00</b>	<b>0,55</b>	<b>0,67</b>	<b>0,48</b>	<b>0,78</b>
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	0	120.000.000	150.000.000	153.000.000	156.060.000	0	41.551.750	98.047.270	10.037.000	297.363.500	0,00	0,35	0,65	0,07	1,91
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	0	150.000.000	250.000.000	255.000.000	260.100.000	0	90.685.611	196.567.663	121.346.325	62.628.071	0,00	0,60	0,79	0,48	0,24
Pelaksanaan Konsultasi Publik	0	100.000.000	100.000.000	150.000.000	153.000.000	0	200.998.050	73.146.000	38.650.000	96.063.700	0,00	2,01	0,73	0,26	0,63
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	0	50.000.000	100.000.000	125.000.000	127.500.000	0	16.891.150	0	0	0	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	0	350.000.000	250.000.000	375.000.000	382.500.000	0	224.605.200	164.960.914	39.700.000	211.754.190	0,00	0,64	0,66	0,11	0,55
Penyiapan Bahan Koordinasi	0	80.000.000	75.000.000	90.000.000	91.800.000	0	35.370.550	33.850.279	32.898.200	50.982.541	0,00	0,44	0,45	0,37	0,56

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Musrenbang Kecamatan															
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	0	400.000.000	300.000.000	306.000.000	312.120.000	0	77.785.200	248.643.670	451.615.067	435.771.530	0,00	0,19	0,83	1,48	1,40
<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>0</b>	<b>487.500.000</b>	<b>675.000.000</b>	<b>758.000.000</b>	<b>416.160.000</b>	<b>0</b>	<b>194.236.100</b>	<b>344.966.927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	<b>0,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	0	237.500.000	250.000.000	255.000.000	260.100.000	0	79.612.250	137.725.127	0	0	0,00	0,34	0,55	0,00	0,00
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	0	100.000.000	275.000.000	350.000.000	0	0	114.623.850	207.241.800	0	0	0,00	1,15	0,75	0,00	0,00
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	0	150.000.000	150.000.000	153.000.000	156.060.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>0</b>	<b>765.000.000</b>	<b>474.999.800</b>	<b>331.500.000</b>	<b>338.130.000</b>	<b>0</b>	<b>307.484.175</b>	<b>325.285.685</b>	<b>54.620.698</b>	<b>108.505.562</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	<b>0,68</b>	<b>0,16</b>	<b>0,32</b>
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	0	515.000.000	325.000.000	331.500.000	338.130.000	0	81.959.900	191.809.187	54.620.698	100.396.362	0,00	0,16	0,59	0,16	0,30

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	0	250.000.000	149.999.800			0	225.524.275	133.476.498	0	8.109.200	0,00	0,90	0,89	0,00	0,00
<b>Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>550.000.000</b>	<b>561.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.500.000</b>	<b>99.345.198</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>	<b>0,18</b>
Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	0	0		250.000.000	255.000.000	0	0	0	94.500.000	99.345.198	0,00	0,00	0,00	0,38	0,39
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	0	0		300.000.000	306.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>0</b>	<b>2.480.778.692</b>	<b>2.358.252.692</b>	<b>3.509.760.000</b>	<b>3.579.955.200</b>	<b>0</b>	<b>818.651.601</b>	<b>1.442.211.476</b>	<b>857.373.744</b>	<b>1.569.446.296</b>	<b>0,00</b>	<b>0,33</b>	<b>0,61</b>	<b>0,24</b>	<b>0,44</b>
<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>0</b>	<b>717.889.300</b>	<b>648.426.930</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>1.224.000.000</b>	<b>0</b>	<b>201.166.909</b>	<b>567.355.761</b>	<b>293.914.126</b>	<b>633.034.434</b>	<b>0,00</b>	<b>0,28</b>	<b>0,87</b>	<b>0,24</b>	<b>0,52</b>
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	0	310.000.000	282.926.325	500.000.000	510.000.000	0	50.827.700	225.517.989	130.707.788	238.077.069	0,00	0,16	0,80	0,26	0,47

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
(RPJPD, RPJMD dan RKPDP)															
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	0	0		50.000.000	51.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	0	51.253.325	42.202.905	50.000.000	51.000.000	0	3.318.850	33.655.000	0	29.066.000	0,00	0,06	0,80	0,00	0,57
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	0	316.000.000	288.483.415	500.000.000	510.000.000	0	142.916.609	288.247.772	163.206.338	265.325.015	0,00	0,45	1,00	0,33	0,52
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	0	0		50.000.000	51.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	0	40.635.975	34.814.285	50.000.000	51.000.000	0	4.103.750	19.935.000	0	100.566.350	0,00	0,10	0,57	0,00	1,97

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>0</b>	<b>721.889.392</b>	<b>621.825.762</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>1.122.000.000</b>	<b>0</b>	<b>170.098.761</b>	<b>443.535.300</b>	<b>285.794.100</b>	<b>500.147.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,71</b>	<b>0,26</b>	<b>0,45</b>
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0	320.000.000	290.173.000	450.000.000	459.000.000	0	85.560.390	198.458.350	132.141.900	219.957.600	0,00	0,27	0,68	0,29	0,48
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	0	0		50.000.000	51.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	0	45.637.389	29.238.400	50.000.000	51.000.000	0	5.394.050	22.309.750	0	29.999.800	0,00	0,12	0,76	0,00	0,59
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0	315.000.000	273.932.332	450.000.000	459.000.000	0	74.279.171	200.407.800	153.652.200	215.189.800	0,00	0,24	0,73	0,34	0,47
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	0	0		50.000.000	51.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	0	41.252.003	28.482.030	50.000.000	51.000.000	0	4.865.150	22.359.400	0	35.000.000	0,00	0,12	0,79	0,00	0,69
<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>0</b>	<b>1.041.000.000</b>	<b>1.088.000.000</b>	<b>1.209.760.000</b>	<b>1.233.955.200</b>	<b>0</b>	<b>447.385.931</b>	<b>431.320.415</b>	<b>277.665.518</b>	<b>436.264.662</b>	<b>0,00</b>	<b>0,43</b>	<b>0,40</b>	<b>0,23</b>	<b>0,35</b>
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0	425.000.000	490.000.000	499.800.000	509.796.000	0	174.529.703	194.399.008	134.860.118	199.121.763	0,00	0,41	0,40	0,27	0,39
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	0	0		50.000.000	51.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	0	75.000.000	38.000.000	38.760.000	39.535.200	0	14.636.250	18.499.500	0	25.000.000	0,00	0,20	0,49	0,00	0,63
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	0	466.000.000	520.000.000	530.400.000	541.008.000	0	242.784.028	199.922.507	142.805.400	188.902.899	0,00	0,52	0,38	0,27	0,35

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
(RPJPD, RPJMD dan RKPDP)															
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	0	0		50.000.000	51.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	0	75.000.000	40.000.000	40.800.000	41.616.000	0	15.435.950	18.499.400	0	23.240.000	0,00	0,21	0,46	0,00	0,56
<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>0</b>	<b>1.452.378.639</b>	<b>2.016.500.000</b>	<b>2.056.830.000</b>	<b>2.097.966.600</b>	<b>0</b>	<b>356.323.300</b>	<b>330.641.732</b>	<b>154.594.400</b>	<b>669.199.324</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,16</b>	<b>0,08</b>	<b>0,32</b>
<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>0</b>	<b>337.622.673</b>	<b>550.000.000</b>	<b>561.000.000</b>	<b>572.220.000</b>	<b>0</b>	<b>10.640.700</b>	<b>117.724.932</b>	<b>79.594.400</b>	<b>111.832.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,21</b>	<b>0,14</b>	<b>0,20</b>
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	0	250.000.000	250.000.000	255.000.000	260.100.000	0	10.640.700	117.724.932	79.594.400	111.832.800	0,00	0,04	0,47	0,31	0,43
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	0	0	150.000.000	153.000.000	156.060.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	0	87.622.673	150.000.000	153.000.000	156.060.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>0</b>	<b>166.500.000</b>	<b>466.500.000</b>	<b>475.830.000</b>	<b>485.346.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314.542.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,65</b>
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	0	166.500.000	166.500.000	169.830.000	173.226.600	0	0	0	0	70.905.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	0	0	150.000.000	153.000.000	156.060.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	0	0	150.000.000	153.000.000	156.060.000	0	0	0	0	243.637.600	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56
<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>0</b>	<b>700.000.000</b>	<b>600.000.000</b>	<b>612.000.000</b>	<b>624.240.000</b>	<b>0</b>	<b>306.190.600</b>	<b>65.889.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,44</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	300.000.000	300.000.000	306.000.000	312.120.000	0	113.878.800	0	0	0	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	0	400.000.000	150.000.000	153.000.000	156.060.000	0	192.311.800	65.889.400	0	0	0,00	0,48	0,44	0,00	0,00
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	0	0	150.000.000	153.000.000	156.060.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>0</b>	<b>248.255.966</b>	<b>400.000.000</b>	<b>408.000.000</b>	<b>416.160.000</b>	<b>0</b>	<b>39.492.000</b>	<b>147.027.400</b>	<b>75.000.000</b>	<b>242.823.624</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,37</b>	<b>0,18</b>	<b>0,58</b>
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan	0	126.289.287	200.000.000	204.000.000	208.080.000	0	39.492.000	98.482.850	75.000.000	242.823.624	0,00	0,31	0,49	0,37	1,17

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif															
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	0	121.966.679	200.000.000	204.000.000	208.080.000	0	0	48.544.550	0	0	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>0</b>	<b>100.000.000</b>	<b>550.000.000</b>	<b>561.000.000</b>	<b>572.220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174.343.226</b>	<b>65.029.000</b>	<b>184.741.654</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,32</b>	<b>0,12</b>	<b>0,32</b>
<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>0</b>	<b>100.000.000</b>	<b>550.000.000</b>	<b>561.000.000</b>	<b>572.220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174.343.226</b>	<b>65.029.000</b>	<b>184.741.654</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,32</b>	<b>0,12</b>	<b>0,32</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	0	100.000.000	200.000.000	204.000.000	208.080.000	0	0	174.343.226	65.029.000	184.741.654	0,00	0,00	0,87	0,32	0,89
Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	0	0	100.000.000	102.000.000	104.040.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Membangun Metadata Statistik Sektoral	0	0	250.000.000	255.000.000	260.100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Hasil Analisis Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya 2025.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 – 2024 senantiasa mengalami fluktuatif. Hal ini dikarenakan pada kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya.

#### 2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Bappedalitbangda memberikan layanan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta bidang statistik. Kelompok sasaran layanan pada Beppedalitbangda adalah semua perangkat daerah, DPRD, instansi vertikal, akademisi dan masyarakat.

##### a. Mitra Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemberian Pelayanan

Mitra Bappelitbangda dalam Pemberian Pelayanan dapat terlihat pada Tabel 2.6. berikut :

**Tabel 2.6.**  
**Mitra Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya**  
**Dalam Pemberian Layanan**

No.	Jenis Layanan yang Diberikan	Mitra Kerja Sama	Bentuk Kerja Sama	Keterangan
1.	Pelayanan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	Forum Komunikasi Pimpinan Daerah	Pelayanan Koordinasi dan Sinkronisasi	Berjalan Rutin
2.	Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Se-Kabupaten Tasikmalaya	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	
3.		Unsur Kecamatan di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya		
4.		Unsur Pemerintahan Desa		

5.		Unsur Akademisi		
6.		Instansi Vertical		

Sumber : Hasil Analisis Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya 2025.

**b. Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya**

Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Bappelitbangda dapat terlihat pada Tabel 2.7. berikut :

**Tabel 2.7.**  
**Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya**

No.	Nama BUMD yang Mendukung	Bentuk Dukungan BUMD	Hasil/Outcome yang Dicapai	Keterangan
1.	BJB Cabang Singaparna	Penyediaan dan distribusi CSR	Dana CSR tersedia dan terdistribusi tepat sasaran	Dukung indicator SDGs
2.	PD BPR Artha Galunggung			
3.	PD BPR Artha Sukapura			
4.	PT BPR Cipatujah Jabar Perseroda			
5.	PT Abhyakta Dharma Yasa Tasikmalaya			
6.	PT LKM Pancatengah Tasikmalaya			
7.	Perumda Air Minum Tirta Sukapura			

Sumber : Hasil Analisis Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya 2025.

**c. Kerja Sama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya**

Kerja Sama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya dapat terlihat pada Tabel 2.8. berikut :

**Tabel 2.8.**  
**Kerja Sama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya**

No.	Mitra Kerja Sama (Pemerintah / Swasta)	Ruang Lingkup Kerja Sama	Dasar Hukum Kerja Sama	Status Pelaksanaan
1.	Universitas Siliwangi	Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Penelitian dan Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</li> <li>• PP Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah</li> <li>• Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga</li> </ul>	Berjalan

*Sumber : Hasil Analisis Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya 2025.*

**2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Bappelitbangda**

**2.2.1. Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda**

Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang

perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta statistik yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya adalah melaksanakan fungsi perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah yang dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan pelayanan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.9.**  
**Pemetaan Permasalahan Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya**

<b>No.</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kualitas data pembangunan daerah belum memadai sebagai dasar perencanaan berbasis evidensi	Perencanaan pembangunan belum sepenuhnya berbasis data yang akurat, dan terkini	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem pengumpulan dan pemutakhiran data belum optimal</li> <li>• Koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan data belum optimal</li> <li>• Belum tersedianya tenaga statistik/pengelola data yang kompeten setiap PD</li> <li>• Data sektoral tersebar dan tidak terintegrasi</li> </ul>
2.	Keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi belum optimal.	Sinkronisasi antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program pembangunan belum sepenuhnya berjalan konsisten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi antar PD dalam penyusunan dokumen perencanaan belum efektif</li> <li>• Hasil monitoring dan evaluasi pembangunan belum sepenuhnya</li> </ul>

<b>No.</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>menjadi dasar penyusunan rencana dan kebijakan berikutnya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum adanya mekanisme pendampingan dan pembinaan yang berkelanjutan dalam penyusunan dokumen perencanaan</li> </ul>
3.	Kapasitas SDM Perencana, Peneliti, dan Statistisi belum merata dan belum sepenuhnya kompeten dalam perencanaan berbasis data dan kinerja	Terbatasnya ASN yang kompeten dalam analisis data, statistik, dan perencanaan pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan dan pengembangan SDM belum memadai</li> </ul>
4.	Budaya dan Ekosistem Inovasi Daerah belum terbangun secara optimal	Keterbatasan infrastruktur dan kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Literasi digital rendah, pegawai kurang memahami visi inovasi, interoperability aplikasi lemah.</li> <li>• Kurangnya insentif inovasi</li> <li>• Minim kolaborasi</li> </ul>
5.	Pelaksanaan fungsi Penelitian dan pengembangan daerah belum optimal dalam mendukung	Pemanfaatan Hasil penelitian dan kajian belum dijadikan dasar dalam penyusunan rencana program	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinergi riset dengan perencanaan belum optimal</li> <li>• Dukungan kebijakan</li> </ul>

<b>No.</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
	perencanaan dan inovasi pembangunan	dan kebijakan pembangunan daerah	terhadap R&D terbatas

*Sumber : Hasil Analisis Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya 2025.*

### **2.2.2. Isu Strategis**

Isu strategis Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan basis data pembangunan daerah.
2. Penyusunan dokumen perencanaan berkualitas.
3. Penguatan kapasitas aparatur perencana, peneliti dan statistisi.
4. Penguatan Budaya dan Ekosistem Inovasi Daerah.
5. Sinergi riset dan perencanaan Pembangunan.

**Tabel 2.10.**  
**Rumusan Isu Strategis Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya**

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Ketersediaan Data Perencanaan Pembangunan	Perencanaan pembangunan belum berbasis data akurat & up to date	Kualitas data & informasi pembangunan berkelanjutan	Tuntutan transparansi & SDGs	Kebijakan Satu Data Indonesia	Integrasi data antar daerah	Penguatan basis data pembangunan daerah
Peningkatan kualitas dokumen perencanaan	Sinkronisasi antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program pembangunan belum sepenuhnya berjalan konsisten	Integrasi perencanaan berkelanjutan	Smart governance global	RPJMN dan kebijakan pembangunan nasional	Sinkronisasi RPJMD antar daerah	Penyusunan dokumen perencanaan berkualitas
SDM Perencana, Peneliti & Statistisi	Terbatasnya ASN yang kompeten dalam analisis data, statistik, dan perencanaan	Peningkatan kapasitas SDM	Kompetisi SDM unggul global	Reformasi birokrasi & penguatan ASN	Kesenjangan kapasitas SDM antar daerah	Penguatan kapasitas aparatur perencana, peneliti dan statistisi

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	pembangunan daerah					
Kolaborasi jejaring penelitian & inovasi	Keterbatasan infrastruktur dan kompetensi	Pengembangan inovasi berbasis penelitian	Era Revolusi Industri 4.0 & digitalisasi	Kebijakan ekosistem inovasi nasional	Jejaring riset antar daerah	Penguatan Budaya dan Ekosistem Inovasi Daerah
Relevansi hasil penelitian dengan pembangunan	Pemanfaatan Hasil penelitian dan kajian belum dijadikan dasar dalam penyusunan rencana program dan kebijakan pembangunan daerah	Relevansi riset dengan kebijakan	Evidence-based policy (kebijakan berbasis bukti)	Kolaborasi riset dan kebijakan nasional	Terbatasnya kapasitas penelitian daerah	Sinergi riset & perencanaan pembangunan

*Sumber : Hasil Analisis Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya 2025.*

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

#### **3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Bappelitbangda Tahun 2025-2029**

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran juga dapat diartikan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya dengan Dokumen RPJMD Tahun 2025 – 2029, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Bappelitbangda yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Bappelitbangda berkontribusi untuk mewujudkan Misi ke-5 dalam RPJMD yaitu :

***Misi ke-5 : Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan akuntabel***

Misi ke-5 mempunyai 1 tujuan, yaitu:

T.5. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan sasaran sebagai berikut:

#### S.5.1 Terwujudnya birokrasi yang adaptif dan berintegritas.

Selanjutnya, dengan mengacu pada tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi dalam RPJMD tersebut di atas, maka disusun tujuan dan sasaran jangka menengah Bappelitbangda sebagai berikut :

Tujuan :

Terwujudnya perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, serta layanan statistik yang berkualitas.

Sasaran :

1. Perencanaan Pembangunan Berdampak pada Akselerasi Kinerja Pemerintah Daerah;
2. Pengukuran kinerja pembangunan Berdampak pada Akselerasi Kinerja Pemerintah Daerah;
3. Hasil Kelitbangan bermanfaat;
4. Meningkatnya Dukungan Statistik Sektorial terhadap Pembangunan Daerah.

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran Bappelitbangda beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.1. sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.1.**  
**Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan,**  
**Penelitian dan Pengembangan Daerah**  
**Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 – 2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
S.5.1 Terwujudnya birokrasi yang adaptif dan berintegritas	T1. Terwujudnya perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, serta layanan statistik yang berkualitas		Persentase Capaian Reformasi Birokrasi General (RB General)	Persen	69,81	70,00	70,50	71,00	71,50	72,00	72,50	
		S1. Perencanaan Pembangunan Berdampak pada Akselerasi Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai komponen perencanaan kinerja pada penilaian SAKIP Kabupaten	Poin	21,87	21,90	22	22,10	22,20	22,30	22,40	
		S2. Pengukuran kinerja pembangunan Berdampak pada Akselerasi Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Poin	17,74	17,95	18,25	18,55	18,85	19,15	19,50	
		S3. Hasil Kelitbangan bermanfaat	Persentase Hasil Kajian Penelitian Daerah yang Dirujuk dalam	Persen	100	100	100	100	100	100	100	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Dokumen Perencanaan									
			Indeks Inovasi Daerah	Poin	47,69	50,62	51,02	51,42	51,82	52,22	52,62	
		S4. Meningkatnya Dukungan Statistik Sektoral terhadap Pembangunan Daerah	Indeks Pembangunan Statistik	Poin	N/A	2,69	2,76	2,83	2,90	2,95	3,02	

Sumber : Hasil Analisis Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya 2025.

### **3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Bappelitbangda dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Bappelitbangda Tahun 2025-2029**

Arah Kebijakan dan Strategi Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya periode 2025-2029 secara konseptual didasarkan pada Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2025-2029 yang menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan Kabupaten Tasikmalaya. Secara operasional Arah Kebijakan dan Strategi Bappelitbangda didasarkan kepada Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 27 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Adapun Visi Kabupaten Tasikmalaya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya yaitu **“TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR”**. Selanjutnya Misi yang telah ditetapkan dalam mencapai Visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu :

1. Mewujudkan Manusia yang Sehat, Cerdas, Berakhlak serta Berbudaya;
2. Mewujudkan Transformasi ekonomi yang produktif dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan Pembangunan Inklusif Melalui Pengentasan Kemiskinan;
4. Mendorong percepatan pembangunan desa berbasis potensi lokal yang berkeadilan dan berkelanjutan didukung sektor digital;
5. Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan akuntabel;

Kemudian Tugas dan Fungsi Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan 3 (tiga) urusan yaitu: 1) Perencanaan Pembangunan, 2) Penelitian dan Pengembangan, serta 3) Statistik.

Perumusan strategi Bappelitbangda dalam melaksanakan urusan sesuai dengan misi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya dilakukan dengan analisis Kekuatan-Kelemahan-Peluang-Tantangan (SWOT). Komponen SWOT dirumuskan sebagai berikut:

### **1. Kekuatan (*Strength*) :**

- a. Kedudukan strategis sebagai *leading sector* dalam perencanaan pembangunan daerah;
- b. Memiliki kewenangan dalam mengoordinasikan program/kegiatan Perangkat Daerah agar selaras dengan Visi dan Misi pembangunan daerah;
- c. Memiliki peran strategis dalam pelaksanaan riset dan inovasi yang mendukung pembangunan daerah;
- d. Memiliki akses data dengan penyelenggaraan statistik sektoral yang mendukung dalam perencanaan pembangunan daerah;
- e. Memiliki Sumber Daya Aparatur yaitu tenaga perencana dan peneliti di bidang pembangunan daerah.

### **2. Kelemahan (*Weaknesses*) :**

- a. Program prioritas dalam dokumen perencanaan belum sepenuhnya didukung oleh kemampuan anggaran daerah;
- b. Hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya diintegrasikan sebagai dasar perbaikan dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah pada periode/tahun berikutnya;
- c. Belum optimalnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah;
- d. Pemanfaatan data hasil penyelenggaraan statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah belum optimal;
- e. Kuantitas Sumber Daya Aparatur yang tersedia belum sesuai dengan hasil perhitungan kebutuhan;

### **3. Peluang (*Opportunities*) :**

- a. Dukungan pemerintah pusat dan provinsi untuk peningkatan kapasitas perencanaan daerah;
- b. Perkembangan SIPD, big data, dan digitalisasi perencanaan yang mempermudah integrasi data;
- c. Adanya ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, swasta dan masyarakat sipil;

- d. Pemanfaatan teknologi dan informasi berupa data real-time dalam perencanaan pembangunan daerah;
- e. Terbukanya kesempatan pengembangan kompetensi aparatur berupa diklat teknis, bimtek, workshop, seminar dan sejenisnya untuk meningkatkan kualitas aparatur;

**4. Tantangan (*Threats*) :**

- a. Perbedaan pendekatan perencanaan teknokratis dan politis berpotensi memicu deviasi terhadap tujuan pembangunan yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- b. Adanya regulasi yang kompleks dan perubahan kebijakan pusat dan provinsi yang memerlukan penyesuaian cepat;
- c. Perubahan kebijakan fiskal nasional dan provinsi yang mempengaruhi kapasitas anggaran daerah;
- d. Digitalisasi perencanaan pembangunan daerah terkendala infrastruktur dan kehandalan sistem;
- e. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur perencana perangkat daerah masih kurang.

Selanjutnya Ke-empat komponen tersebut ditabulasi silang untuk merumuskan Strategi yang terdiri dari: 1) Strategi SO; 1) Strategi S-T; 3) Strategi W-O dan 4) Strategi W-T.

**Tabel 3.2. Perumusan Strategi Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Dengan Analisis SWOT**

	<b>PELUANG</b>	<b>TANTANGAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan pemerintah pusat dan provinsi untuk peningkatan kapasitas perencanaan daerah;</li> <li>2. Perkembangan SIPD, big data, dan digitalisasi perencanaan yang mempermudah integrasi data;</li> <li>3. Adanya ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, swasta dan masyarakat sipil;</li> <li>4. Pemanfaatan teknologi dan informasi berupa data real-time dalam perencanaan pembangunan daerah;</li> <li>5. Terbukanya kesempatan pengembangan kompetensi aparatur berupa diklat teknis, bimtek, workshop, seminar dan sejenisnya untuk meningkatkan kualitas aparatur.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbedaan pendekatan perencanaan teknokratis dan politis berpotensi memicu deviasi terhadap tujuan pembangunan yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan pembangunan daerah;</li> <li>2. Adanya regulasi yang kompleks dan perubahan kebijakan pusat dan provinsi yang memerlukan penyesuaian cepat;</li> <li>3. Perubahan kebijakan fiskal nasional dan provinsi yang mempengaruhi kapasitas anggaran daerah;</li> <li>4. Digitalisasi perencanaan pembangunan daerah terkendala infrastruktur dan kehandalan sistem;</li> <li>5. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur perencana perangkat daerah masih kurang.</li> </ol>

<b>KEKUATAN</b>	<b>STRATEGI (S – O)</b>	<b>STRATEGI (S – T)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kedudukan strategis sebagai <i>leading sector</i> dalam perencanaan pembangunan daerah;</li> <li>2. Memiliki kewenangan dalam mengoordinasikan program/kegiatan Perangkat Daerah agar selaras dengan Visi dan Misi pembangunan daerah;</li> <li>3. Memiliki peran strategis dalam pelaksanaan riset dan inovasi yang mendukung pembangunan daerah;</li> <li>4. Memiliki akses data dengan penyelenggaraan statistik sektoral yang mendukung dalam perencanaan pembangunan daerah;</li> <li>5. Memiliki Sumber Daya Aparatur yaitu tenaga perencana dan peneliti di bidang pembangunan daerah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Kinerja;</li> <li>2) Optimalisasi penggunaan SIPD dan digitalisasi perencanaan yang mempermudah integrasi data;</li> <li>3) Meningkatkan kemitraan dengan perguruan tinggi, swasta dan lembaga lain yang terkait untuk penelitian, pengembangan dan pendanaan;</li> <li>4) Optimalisasi penggunaan teknologi dan informasi dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi, riset dan inovasi daerah serta statistik;</li> <li>5) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur bidang perencanaan, penelitian, penge</li> <li>6) mbangan dan statistik melalui pengembangan kompetensi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatkan koordinasi dan konsultasi perangkat daerah agar meminimalisir deviasi antara dokumen perencanaan;</li> <li>2) Meningkatkan kualitas perencanaan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan;</li> <li>3) Optimalisasi perencanaan pembangunan dengan kerja sama pembiayaan lintas sektor;</li> <li>4) Optimalisasi data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan;</li> <li>5) Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur perencana melalui pengembangan kompetensi.</li> </ol>

<b>KELEMAHAN</b>	<b>STRATEGI (W – O)</b>	<b>STRATEGI (W – T)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program prioritas dalam dokumen perencanaan belum sepenuhnya didukung oleh kemampuan anggaran daerah;</li> <li>2. Hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya diintegrasikan sebagai dasar perbaikan dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah pada periode/tahun berikutnya;</li> <li>3. Belum optimalnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah;</li> <li>4. Pemanfaatan data hasil penyelenggaraan statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah belum optimal;</li> <li>5. Kuantitas Sumber Daya Aparatur yang tersedia belum sesuai dengan hasil perhitungan kebutuhan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatkan kemitraan lintas sektor dalam pelaksanaan pembangunan guna meminimalisir ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat;</li> <li>2) Meningkatkan pengendalian dan evaluasi perencanaan berbasis teknologi dan informasi;</li> <li>3) Optimalisasi hasil riset dan inovasi serta adaptasi teknologi dalam perencanaan pembangunan;</li> <li>4) Optimalisasi data hasil penyelenggaraan statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan;</li> <li>5) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur melalui diklat teknis, bimtek, workshop, seminar dan sejenisnya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menjadikan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai prioritas dalam perencanaan pembangunan;</li> <li>2) Meningkatkan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan guna menghilangkan deviasi antara dokumen perencanaan;</li> <li>3) Optimalisasi hasil riset dan inovasi serta adaptasi teknologi guna merespon perubahan regulasi dan kebijakan;</li> <li>4) Optimalisasi peran statistik dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;</li> <li>5) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur terhadap perubahan lingkungan di bidang perencanaan.</li> </ol>

*Sumber : Hasil Analisis Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya 2025.*

Matriks SWOT merinci daftar (*long list*) rumusan strategi Bappelitbangda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi untuk melaksanakan misi pembangunan pemerintah daerah. Daftar rumusan strategi tersebut adalah:

- 1) Melaksanakan verifikasi dan validasi data sektoral secara berkala;
- 2) Meningkatkan kemampuan SDM perangkat daerah dalam pengelolaan dan analisis data statistik;
- 3) Mengoptimalkan sinkronisasi data dengan BPS dan instansi vertikal;
- 4) Memperkuat keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan;
- 5) Mengoptimalkan penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;
- 6) Penguatan peran dan fungsi Bappelitbangda sebagai pusat koordinasi perencanaan, penelitian, dan statistik daerah;
- 7) Peningkatan dukungan anggaran dan sarana prasarana untuk kegiatan pengembangan kompetensi ASN di bidang tersebut;
- 8) Mendorong perubahan mindset aparatur dari berorientasi prosedural menjadi berorientasi hasil dan solusi inovatif
- 9) Mengintegrasikan nilai-nilai inovatif ke dalam tata kelola pemerintahan, manajemen kinerja, dan reformasi birokrasi;
- 10) Pemberian apresiasi, penghargaan, dan insentif bagi perangkat daerah atau individu yang menghasilkan inovasi berdampak nyata;
- 11) Mengembangkan mekanisme agar hasil penelitian dan kajian dapat menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan;
- 12) Mendorong kemitraan Bappelitbangda dengan universitas, BRIN, dan lembaga riset daerah/nasional;
- 13) Membangun repository atau portal data riset daerah yang mudah diakses untuk mendukung perencanaan berbasis data;
- 14) Meningkatkan kompetensi analisis kebijakan, riset kebijakan publik, dan statistik untuk mendukung kebijakan berbasis bukti.

Strategi berdasarkan analisis SWOT di atas kemudian dikombinasikan dengan Tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya. Hasil kombinasi tersebut selanjutnya dikembangkan menjadi Arah Kebijakan Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya yang secara rinci diuraikan pada Tabel 3.3.

**Tabel 3.3.**  
**Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi**  
**Renstra Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya**

<b>Visi : TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR</b>							
<b>Misi ke-5 : Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan akuntabel</b>							
<b>TUJUAN</b>		<b>SASARAN</b>		<b>ARAH KEBIJAKAN</b>		<b>STRATEGI</b>	
1.	Terwujudnya perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, serta layanan statistik yang berkualitas	1.	Perencanaan Pembangunan Berdampak pada Akselerasi Kinerja Pemerintah Daerah	1.	Integrasi Perencanaan dan Penganggaran	1.	Menguatkan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan
						2.	Mengoptimalkan penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran
		2.	Pengukuran kinerja pembangunan Berdampak pada Akselerasi Kinerja Pemerintah Daerah	2.	Integrasi Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3.	Pemanfaatan teknologi dan informasi berupa data real-time dalam Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		3.	Hasil Kelitbangan bermanfaat	3.	Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola SDM	4.	Penguatan peran dan fungsi Bappelitbangda

**Visi : TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR**

**Misi ke-5 : Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan akuntabel**

TUJUAN		SASARAN		ARAH KEBIJAKAN		STRATEGI	
					Perencanaan, Litbang, dan Statistik		sebagai pusat koordinasi perencanaan, penelitian, dan statistik daerah
						5.	Peningkatan dukungan anggaran dan sarana prasarana untuk kegiatan pengembangan kompetensi ASN di bidang tersebut
				4.	Penguatan Budaya Inovasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah	6.	Mendorong perubahan mindset aparatur dari berorientasi prosedural menjadi berorientasi hasil dan solusi inovatif
						7.	Mengintegrasikan nilai-nilai inovatif ke dalam tata kelola pemerintahan, manajemen kinerja, dan reformasi birokrasi
						8.	Pemberian apresiasi, penghargaan, dan insentif bagi perangkat daerah atau individu yang menghasilkan inovasi

**Visi : TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR**

**Misi ke-5 : Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan akuntabel**

TUJUAN		SASARAN		ARAH KEBIJAKAN		STRATEGI	
							berdampak nyata
				5.	Penguatan integrasi hasil riset dalam proses perencanaan pembangunan	9.	Mengembangkan mekanisme agar hasil penelitian dan kajian dapat menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan
						10.	Mendorong kemitraan Bappelitbangda dengan universitas, BRIN, dan lembaga riset daerah/nasional
						11.	Membangun repository atau portal data riset daerah yang mudah diakses untuk mendukung perencanaan berbasis data
						12.	Meningkatkan kompetensi analisis kebijakan, riset kebijakan publik, dan statistik untuk mendukung kebijakan berbasis bukti
		4.	Meningkatnya Dukungan Statistik Sektoral terhadap Pembangunan Daerah	6.	Peningkatan Kualitas dan Validitas Data Statistik Sektoral	13.	Melaksanakan verifikasi dan validasi data sektoral secara berkala
						14.	Meningkatkan kemampuan

<b>Visi : TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR</b>							
<b>Misi ke-5 : Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan akuntabel</b>							
TUJUAN		SASARAN		ARAH KEBIJAKAN		STRATEGI	
							SDM perangkat daerah dalam pengelolaan dan analisis data statistik
						15.	Mengoptimalkan sinkronisasi data dengan BPS dan instansi vertikal

Sumber : Hasil Analisis Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya 2025.

**Tabel 3.4. Penahapan Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029**

<b>TAHAP I (2026)</b>	<b>TAHAP II (2027)</b>	<b>TAHAP III (2028)</b>	<b>TAHAP IV (2029)</b>	<b>TAHAP V (2030)</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Sistem dan Regulasi Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, Statistik Sektoral serta peningkatan kapasitas SDM	Kolaborasi jejaring penelitian dan inovasi serta peningkatan kematangan penyelenggaraan statistik sektoral untuk mendukung perencanaan pembangunan	Akselerasi kualitas perencanaan pembangunan dengan didasarkan pada hasil penelitian dan pengembangan yang relevan dan didukung dengan data statistik sektoral yang akurat dan up to date	Pemantapan sinergi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah serta statistik sektoral	Perwujudan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah serta statistik sektoral yang Berkualitas

Sumber : Hasil Analisis Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya 2025.

**Tabel 3.5. Arah Kebijakan Rencana Strategis Bappelitbangda  
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029**

<b>NO.</b>	<b>OPERASIONALISASI NSPK</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN RPJMD</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD</b>	<b>KET.</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	S.5.1 Terwujudnya birokrasi yang adaptif dan berintegritas	Peningkatan kualitas pelayanan Publik	Integrasi Perencanaan dan Penganggaran	

*Sumber : Hasil Analisis Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya 2025.*

**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA**  
**PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan daerah, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029.

**4.1.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta**

**Pendanaan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya  
Tahun 2025-2029**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai manfaat yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Daerah sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah.

Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1.**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**  
**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**  
**Kabupaten Tasikmalaya**  
**Tahun 2025 – 2029**

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>S.5.1</b> <b>Terwujudnya birokrasi yang adaptif dan berintegritas</b>	<b>T1.</b> <b>Terwujudnya perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, serta layanan statistik yang berkualitas</b>				<b>Persentase Capaian Reformasi Birokrasi General (RB General)</b>		
			<b>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan pada Bappelitbangda</b>		<b>Indeks Reformasi Birokrasi Bappelitbangda</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
				<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappelitbangda</b>	<b>Nilai SAKIP Bappelitbangda</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				<b>Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Bappelitbangda</b>	<b>Persentase Realisasi Keuangan Bappelitbangda</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				<b>Barang Milik Daerah Tertib Administrasi</b>	<b>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Yang Tertib Administrasi</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				<b>Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian Bappelitbangda yang sesuai ketentuan</b>	<b>Persentase Layanan Kepegawaian Bappelitbangda</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bappelitbangda</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bappelitbangda</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				<b>Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Bappelitbangda sesuai standar</b>	<b>Persentase pengadaan Barang Milik Daerah pada Bappelitbangda</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				<b>Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik ,Front Office, Driver dan Komunikasi pada Bappelitbangda</b>	<b>Persentase Kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik ,Front Office, Driver dan Komunikasi pada Bappelitbangda</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				<b>Berfungsinya Barang Milik Daerah pada Bappelitbangda sesuai kebutuhan</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah pada Bappelitbangda yang berfungsi dengan baik</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		<b>S1. Perencanaan Pembangunan Berdampak pada Akselerasi Kinerja</b>			<b>Nilai komponen perencanaan kinerja pada penilaian SAKIP Kabupaten</b>		

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<b>Pemerintah Daerah</b>					
			<b>Perencanaan Pembangunan Daerah Mendorong Perbaikan Kinerja Pemerintah Daerah</b>		<b>Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	
				<b>Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja Pembangunan Daerah</b>	<b>Nilai Kualitas Perencanaan Kinerja</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	
				Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	
				Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Pelaksanaan Konsultasi Publik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	
				Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
				<b>Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah</b>	<b>Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	
				Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dengan Dokumen Kebijakan Lain	Pembangunan Daerah Daerah	dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	
				<b>Meningkatnya Kualitas Analisis Data dan Informasi Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Analisis Data dan Informasi Daerah yang sesuai Ketentuan</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	
				Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk erencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
				<b>Meningkatnya pemanfaatan SIPD secara optimal dalam proses perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan SIPD untuk merencanakan pembangunan</b>	<b>Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</b>	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
			<b>Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Mendorong Perbaikan Kinerja Pemerintah Daerah</b>		<b>Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	
				<b>Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Nilai Kualitas Perencanaan Kinerja Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
				Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			<b>Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Mendorong Perbaikan Kinerja Pemerintah Daerah</b>		<b>Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<b>Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja Pembangunan Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam</b>	<b>Nilai Kualitas Perencanaan Kinerja Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam</b>	
				Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Bidang Perekonomian	Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
				Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam	
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			<b>Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Infrastruktur dan kewilayahan Mendorong Perbaikan Kinerja Pemerintah Daerah</b>		<b>Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	
				<b>Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja Pembangunan Lingkup Bidang Infrastruktur dan kewilayahan</b>	<b>Nilai Kualitas Perencanaan Kinerja Lingkup Bidang Infrastruktur dan kewilayahan</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan</b>	
				Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
				Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Daerah Bidang Kewilayahan	
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	
		<b>S2. Pengukuran kinerja pembangunan Berdampak pada Akselerasi Kinerja Pemerintah Daerah</b>			<b>Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten</b>		
			<b>Pengukuran Kinerja dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<b>Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Pemerintah Daerah</b>	<b>Nilai Kualitas Dokumen Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	
				Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
			<b>Pengukuran Kinerja Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dimanfaatkan dalam perbaikan</b>		<b>Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			<b>perencanaan kinerja</b>				
				<b>Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Nilai Kualitas Dokumen Pengukuran Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			<b>Pengukuran Kinerja Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan kinerja</b>		<b>Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	
				<b>Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam</b>	<b>Nilai Kualitas Dokumen Pengukuran Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam</b>	
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam	
			<b>Pengukuran Kinerja Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan kinerja</b>		<b>Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	
				<b>Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan</b>	<b>Nilai Kualitas Dokumen Pengukuran Kinerja Pembangunan Perangkat</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan</b>	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<b>Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>		
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<b>S3. Hasil Kelitbangan bermanfaat</b>			<b>1. Persentase Hasil Kajian Penelitian Daerah yang Dirujuk dalam Dokumen Perencanaan</b> <b>2. Indeks Inovasi Daerah</b>		
			<b>Meningkatnya Diseminasi Hasil Kelitbangan</b>		<b>Persentase Hasil Kelitbangan yang Diseminasikan</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	
				<b>Hasil Kelitbangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Memenuhi Standar</b>	<b>Persentase Hasil Kelitbangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang Memenuhi Standar</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	
				Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	
				Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	
				Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	
				<b>Hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan Memenuhi Standar</b>	<b>Persentase Hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang Memenuhi Standar</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	
				<b>Hasil Kelitbangan Bidang Bidang Ekonomi dan Pembangunan Memenuhi Standar</b>	<b>Persentase Hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Memenuhi Standar</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	
				<b>Inovasi Daerah Bermutu</b>	<b>Persentase Usulan Inovasi Perangkat Daerah yang Terdaftar Indeks Inovasi Daerah (IID)</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	
		<b>S4. Meningkatnya Dukungan Statistik Sektoral terhadap Pembangunan Daerah</b>			<b>Indeks Pembangunan Statistik</b>		
			<b>Meningkatnya Pemanfaatan data statistik dalam Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Data Statistik dalam Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	
				<b>Data statistik pada portal SDI Kabupaten Tasikmalaya mutakhir</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah yang termutakhirkan data</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di</b>	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					<b>statistiknya pada portal SDI Kabupaten Tasikmalaya</b>	<b>Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	
				Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	
				Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
				Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
				Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	

*Sumber : Hasil Analisis Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya 2025.*

**Tabel 4.2.**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**  
**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**  
**Kabupaten Tasikmalaya**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					142,480,500		250,330,110		255,336,712		260,443,446		265,652,315	
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL														
<i>(Outcome)</i>	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Data Statistik dalam Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	%	N/A	100%	142,480,500	100%	250,330,110	100%	255,336,712	100%	260,443,446	100%	265,652,315	
Meningkatnya Pemanfaatan data statistik dalam Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah														
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota														
<i>(Output)</i>	Persentase Perangkat Daerah yang termutakhirkan data statistiknya pada portal SDI Kabupaten Tasikmalaya	%	N/A	100%	142,480,500	100%	250,330,110	100%	255,336,712	100%	260,443,446	100%	265,652,315	
Data statistik pada portal SDI Kabupaten Tasikmalaya mutakhir														
Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia														
<i>(Output)</i>	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	%	N/A			100%	25,000,000	100%	25,500,000	100%	26,010,000	100%	26,530,200	
Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia														
Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral														
<i>(Output)</i>		%	N/A	100%	142,480,500	100%	145,330,110	100%	148,236,712	100%	151,201,446	100%	154,225,475	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data													
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral														
<i>(Output)</i>	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang	N/A		-	42 Orang	25,000,000	42 Orang	25,500,000	42 Orang	26,010,000	42 Orang	26,530,200	
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral														
Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar														
<i>(Output)</i>	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	%	N/A			100%	20,000,000	100%	20,400,000	100%	20,808,000	100%	21,224,160	
Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar														
Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral														
<i>(Output)</i>	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	Laporan	N/A			1 Laporan	35,000,000	1 Laporan	35,700,000	1 Laporan	36,414,000	1 Laporan	37,142,280	
Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah														
<b>PERENCANAAN</b>					<b>11,888,420,229</b>		<b>13,729,788,634</b>		<b>13,640,384,406</b>		<b>13,913,192,094</b>		<b>14,191,455,936</b>	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>														
<i>(Outcome)</i>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Bappelitbangda</b>	<b>Poin</b>	<b>89,10</b>	<b>89,30</b>	<b>10,035,376,541</b>	<b>89,40</b>	<b>11,639,684,072</b>	<b>89,50</b>	<b>11,508,477,753</b>	<b>89,60</b>	<b>11,738,647,308</b>	<b>89,70</b>	<b>11,973,420,254</b>	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan pada Bappelitbangda														
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>(Output)</b>	<b>Nilai SAKIP Bappelitbangda</b>	<b>Poin</b>	<b>82 Poin</b>	<b>82,6 Poin</b>	<b>186,336,801</b>	<b>82,7 Poin</b>	<b>220,063,537</b>	<b>82,8 Poin</b>	<b>224,464,808</b>	<b>82,9 Poin</b>	<b>228,954,104</b>	<b>83 Poin</b>	<b>233,533,186</b>	
<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappelitbangda</b>														
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
<i>(Output)</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	113,615,201	2 Dokumen	115,887,505	2 Dokumen	118,205,255	2 Dokumen	120,569,360	3 Dokumen	122,980,747	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
<i>(Output)</i>	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	N/A	-	3 Laporan	30,000,000	3 Laporan	30,600,000	3 Laporan	31,212,000	3 Laporan	31,836,240		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
<i>(Output)</i>	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6 Laporan	4 Laporan	72,721,600	4 Laporan	74,176,032	4 Laporan	75,659,553	4 Laporan	77,172,744	4 Laporan	78,716,199	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>														
<b>(Output)</b>	<b>Persentase Realisasi Keuangan Bappelitbangda</b>	<b>%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>7,141,409,838</b>	<b>100%</b>	<b>7,314,238,035</b>	<b>100%</b>	<b>7,460,522,795</b>	<b>100%</b>	<b>7,609,733,251</b>	<b>100%</b>	<b>7,761,927,916</b>	
<b>Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Bappelitbangda</b>														
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
<i>(Output)</i>	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	44 Orang/Bulan	50 Orang/Bulan	7,105,128,838	50 Orang/Bulan	7,247,231,415	50 Orang/Bulan	7,392,176,043	50 Orang/Bulan	7,540,019,564	50 Orang/Bulan	7,690,819,955	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
<i>(Output)</i>	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	N/A	-	12 Dokumen	30,000,000	12 Dokumen	30,600,000	12 Dokumen	31,212,000	12 Dokumen	31,836,240		
Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
<i>(Output)</i>	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	36,281,000	1 Laporan	37,006,620	1 Laporan	37,746,752	1 Laporan	38,501,687	1 Laporan	39,271,721	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>														
<i>(Output)</i>	<b>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Yang Tertib Administrasi</b>	%	N/A	-	100%	25,000,000	100%	25,500,000	100%	26,010,000	100%	26,530,200		
<b>Barang Milik Daerah Tertib Administrasi</b>														
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
<i>(Output)</i>	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	N/A	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,500,000	1 Laporan	26,010,000	1 Laporan	26,530,200			
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>														
<i>(Output)</i>	<b>Persentase Layanan Kepegawaian Bappelitbangda</b>	%	N/A	-	100%	145,000,000	100%	147,900,000	100%	150,858,000	100%	153,875,160		
<b>Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian Bappelitbangda yang sesuai ketentuan</b>														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
<i>(Output)</i>	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	N/A			1 Paket	40,000,000	1 Paket	40,800,000	1 Paket	41,616,000	1 Paket	42,448,320	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan														
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
<i>(Output)</i>	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	N/A			1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,600,000	1 Dokumen	31,212,000	1 Dokumen	31,836,240	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
<i>(Output)</i>	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	N/A			20 Orang	75,000,000	20 Orang	76,500,000	20 Orang	78,030,000	20 Orang	79,590,600	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>														
<i>(Output)</i>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bappelitbangda</b>	<b>Poin</b>	<b>85,179 Poin</b>	<b>85,30 Poin</b>	<b>650,194,552</b>	<b>85,40 Poin</b>	<b>736,798,443</b>	<b>85,50 Poin</b>	<b>751,534,412</b>	<b>85,60 Poin</b>	<b>766,565,100</b>	<b>85,70 Poin</b>	<b>781,896,402</b>	
<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bappelitbangda</b>														
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
<i>(Output)</i>	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12 Paket	12 Paket	167,524,572	12 Paket	170,875,063	12 Paket	174,292,565	12 Paket	177,778,416	12 Paket	181,333,984	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
<i>(Output)</i>	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12 Paket	12 Paket	31,620,980	12 Paket	32,253,400	12 Paket	32,898,468	12 Paket	33,556,437	12 Paket	34,227,566	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
<i>(Output)</i>	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	58,000,000	12 Dokumen	59,160,000	12 Dokumen	60,343,200	12 Dokumen	61,550,064	12 Dokumen	62,781,065	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan														
Fasilitasi Kunjungan Tamu														
<i>(Output)</i>	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	56,800,000	12 Laporan	57,936,000	12 Laporan	59,094,720	12 Laporan	60,276,614	12 Laporan	61,482,147	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu														
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
<i>(Output)</i>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	336,249,000	12 Laporan	342,973,980	12 Laporan	349,833,460	12 Laporan	356,830,129	12 Laporan	363,966,731	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
<i>(Output)</i>	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	N/A	-	-	1 Dokumen	38,600,000	1 Dokumen	39,372,000	1 Dokumen	40,159,440	1 Dokumen	40,962,629	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
<i>(Output)</i>	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	N/A	-	-	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	35,700,000	1 Dokumen	36,414,000	1 Dokumen	37,142,280	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>														
<i>(Output)</i>		%	100%	100%	100,000,000	100%	1,102,000,000	100%	760,040,000	100%	775,240,800	100%	790,745,616	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Bappelitbangda sesuai standar</b>	<b>Persentase pengadaan Barang Milik Daerah pada Bappelitbangda</b>													
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
<i>(Output)</i>	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1 Unit	-	2 Unit	700,000,000	1 Unit	350,000,000	1 Unit	357,000,000	1 Unit	364,140,000		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
<i>(Output)</i>	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	N/A	-	3 Unit	100,000,000	3 Unit	102,000,000	3 Unit	104,040,000	3 Unit	106,120,800		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
Pengadaan Mebel														
<i>(Output)</i>	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	N/A	-	5 Unit	100,000,000	5 Unit	102,000,000	5 Unit	104,040,000	5 Unit	106,120,800		
Tersedianya Mebel														
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
<i>(Output)</i>	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	Unit	6 Unit	3 Unit	100,000,000	3 Unit	102,000,000	3 Unit	104,040,000	3 Unit	106,120,800	3 Unit	108,243,216	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya														
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
<i>(Output)</i>	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	15 Unit	-	5 Unit	100,000,000	5 Unit	102,000,000	5 Unit	104,040,000	5 Unit	106,120,800		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>														
<i>(Output)</i>	<b>Persentase Kebutuhan Pelayanan Kebersihan,</b>	%	100%	100%	1,156,097,100	100%	1,179,219,042	100%	1,202,803,423	100%	1,226,859,491	100%	1,251,396,681	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik ,Front Office, Driver dan Komunikasi pada Bappelitbangda</b>	<b>Keamanan, Air, Listrik ,Front Office, Driver dan Komunikasi pada Bappelitbangda</b>													
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
<i>(Output)</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	315,637,100	12 Laporan	321,949,842	12 Laporan	328,388,839	12 Laporan	334,956,616	12 Laporan	341,655,748	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
<i>(Output)</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	840,460,000	12 Laporan	857,269,200	12 Laporan	874,414,584	12 Laporan	891,902,876	12 Laporan	909,740,933	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor														
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>														
<i>(Output)</i>	<b>Persentase Barang Milik Daerah pada Bappelitbangda yang berfungsi dengan baik</b>	%	100%	100%	801,338,250	100%	917,365,015	100%	935,712,315	100%	954,426,562	100%	973,515,093	
<b>Berfungsinya Barang Milik Daerah pada Bappelitbangda sesuai kebutuhan</b>														
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
<i>(Output)</i>	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6 Unit	6 Unit	280,675,000	6 Unit	286,288,500	6 Unit	292,014,270	6 Unit	297,854,555	6 Unit	303,811,647	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
(Output)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15 Unit	15 Unit	169,525,000	15 Unit	172,915,500	15 Unit	176,373,810	15 Unit	179,901,286	15 Unit	183,499,312	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
(Output)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	8 Unit	15 Unit	169,588,000	15 Unit	172,979,760	15 Unit	176,439,355	15 Unit	179,968,142	15 Unit	183,567,505	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
(Output)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	1 Unit	181,550,250	1 Unit	185,181,255	1 Unit	188,884,880	1 Unit	192,662,578	1 Unit	196,515,829	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
(Output)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A		-	1 Unit	100,000,000	1 Unit	102,000,000	1 Unit	104,040,000	1 Unit	106,120,800	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>				<b>613,340,355</b>		<b>675,607,162</b>		<b>689,119,305</b>		<b>702,901,691</b>		<b>716,959,725</b>	
(Outcome)	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	%	N/A	100%	520,703,743	100%	581,117,818	100%	592,740,174	100%	604,594,978	100%	616,686,877	
	Perencanaan Pembangunan Daerah Mendorong Perbaikan Kinerja Pemerintah Daerah													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>					472,016,383		481,456,711		491,085,845		500,907,562		510,925,713	
<i>(Output)</i>	<b>Nilai Kualitas Perencanaan Kinerja</b>	%	N/A	100%	403,350,471	100%	411,417,480	100%	419,645,830	100%	428,038,747	100%	436,599,522	
<b>Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja Pembangunan Daerah</b>														
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah														
<i>(Output)</i>	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	30,947,202	1 Dokumen	31,566,146	1 Dokumen	32,197,469	1 Dokumen	32,841,418	2 Dokumen	33,498,247	
Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)														
Pelaksanaan Konsultasi Publik														
<i>(Output)</i>	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita acara	2 Berita Acara	1 Berita acara	56,489,085	1 Berita acara	57,618,867	1 Berita acara	58,771,244	1 Berita acara	59,946,669	2 Berita acara	61,145,602	
Terlaksananya Konsultasi Publik														
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														
<i>(Output)</i>	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita acara	2 Berita Acara	1 Berita Acara	68,535,828	1 Berita Acara	69,906,545	1 Berita Acara	71,304,675	1 Berita Acara	72,730,769	2 Berita Acara	74,185,384	
Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota														
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan														
<i>(Output)</i>	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	702 Usulan	702 Usulan	48,621,470	702 Usulan	49,593,899	702 Usulan	50,585,777	702 Usulan	51,597,493	702 Usulan	52,629,443	
Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan														
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
<i>(Output)</i>		Dokumen	5 Dokumen		198,756,886		202,732,024		206,786,664		210,922,397		215,140,845	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)			2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		3 Dokumen		
<b>(Output)</b>	<b>Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah</b>	%	N/A	100%	68,665,912	100%	70,039,230	100%	71,440,015	100%	72,868,815	100%	74,326,191	
<b>Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah</b>														
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya														
<b>(Output)</b>	<b>Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah</b>	Dokumen	5 Dokumen	2 Dokumen	68,665,912	2 Dokumen	70,039,230	2 Dokumen	71,440,015	2 Dokumen	72,868,815	3 Dokumen	74,326,191	
Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain														
<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>														
<b>(Output)</b>	<b>Persentase Dokumen Analisis Data dan Informasi Daerah yang sesuai Ketentuan</b>	%	N/A	-	100%	50,000,000	100%	51,000,000	100%	52,020,000	100%	53,060,400		
<b>Meningkatnya Kualitas Analisis Data dan Informasi Daerah</b>														
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah														
<b>(Output)</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)</b>	Dokumen	N/A	-	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	51,000,000	1 Dokumen	52,020,000	1 Dokumen	53,060,400		
Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk erencanaan Pembangunan Daerah														
<b>Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</b>														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<i>(Output)</i>	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan SIPD secara optimal dalam proses perencanaan pembangunan	%	N/A	100%	48,687,360	100%	49,661,107	100%	50,654,329	100%	51,667,416	100%	52,700,764	
Meningkatnya pemanfaatan SIPD secara optimal dalam proses perencanaan pembangunan daerah														
Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah														
<i>(Output)</i>	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	48,687,360	1 Dokumen	49,661,107	1 Dokumen	50,654,329	1 Dokumen	51,667,416	1 Dokumen	52,700,764	
Terlaksananya Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah														
<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>					1,239,703,333		1,414,497,400		1,442,787,348		1,471,643,095		1,501,075,956	
					1,116,217,558		1,288,541,909		1,314,312,747		1,340,599,002		1,367,410,982	
<i>(Outcome)</i>	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	N/A	100%	453,275,140	100%	512,340,643	100%	522,587,456	100%	533,039,205	100%	543,699,989	
Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Mendorong Perbaikan Kinerja Pemerintah Daerah														
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia														
<i>(Output)</i>	Nilai Kualitas Perencanaan Kinerja Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	N/A	100%	453,275,140	100%	512,340,643	100%	522,587,456	100%	533,039,205	100%	543,699,989	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia														
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
(Output)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	5 Dokumen	3 Dokumen	114,774,813	3 Dokumen	117,070,309	3 Dokumen	119,411,715	5 Dokumen	121,799,950	3 Dokumen	124,235,949	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan													
(Output)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	N/A	2 Laporan	7,081,625	2 Laporan	7,223,258	2 Laporan	7,367,723	3 Laporan	7,515,077	2 Laporan	7,665,379	
	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan													
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan													
(Output)	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	N/A	-		1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,500,000	1 Laporan	26,010,000	1 Laporan	26,530,200	
	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan													
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
(Output)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	6 Dokumen	3 Dokumen	322,162,045	3 Dokumen	328,605,286	3 Dokumen	335,177,392	5 Dokumen	341,880,939	3 Dokumen	348,718,558	
	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
<i>(Output)</i>	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	N/A	2 Laporan	9,256,657	2 Laporan	9,441,790	2 Laporan	9,630,626	2 Laporan	9,823,238	2 Laporan	10,019,703	
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
<i>(Output)</i>	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	N/A	-		1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,500,000	1 Laporan	26,010,000	1 Laporan	26,530,200	
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia														
<b><i>(Outcome)</i></b>	<b>Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam</b>	<b>%</b>	<b>N/A</b>	<b>100%</b>	<b>330,640,564</b>	<b>100%</b>	<b>387,253,375</b>	<b>100%</b>	<b>394,998,443</b>	<b>100%</b>	<b>402,898,412</b>	<b>100%</b>	<b>410,956,380</b>	
<b>Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Mendorong Perbaikan Kinerja Pemerintah Daerah</b>														
<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam</b>														
<i>(Output)</i>	Nilai Kualitas Perencanaan Kinerja Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	N/A	100%	330,640,564	100%	387,253,375	100%	394,998,443	100%	402,898,412	100%	410,956,380	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja Pembangunan Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
<i>(Output)</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	5 Dokumen	3 Dokumen	152,901,065	3 Dokumen	155,959,086	3 Dokumen	159,078,268	3 Dokumen	162,259,833	3 Dokumen	165,505,030	
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
<i>(Output)</i>	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	N/A	3 Laporan	12,167,917	3 Laporan	12,411,275	3 Laporan	12,659,501	3 Laporan	12,912,691	3 Laporan	13,170,945	
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian														
<i>(Output)</i>	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	N/A	-	-	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,500,000	1 Laporan	26,010,000	1 Laporan	26,530,200	
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian														
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
<i>(Output)</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan	Dokumen	5 Dokumen	2 Dokumen	153,403,665	2 Dokumen	156,471,738	2 Dokumen	159,601,173	2 Dokumen	162,793,197	2 Dokumen	166,049,060	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam														
<i>(Output)</i>	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	N/A	2 Laporan	12,167,917	2 Laporan	12,411,275	2 Laporan	12,659,501	2 Laporan	12,912,691	2 Laporan	13,170,945	
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam														
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam														
<i>(Output)</i>	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	N/A	-		1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,500,000	1 Laporan	26,010,000	1 Laporan	26,530,200	
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA														
<b><i>(Outcome)</i></b>	<b>Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>%</b>	<b>N/A</b>	<b>100%</b>	<b>332,301,854</b>	<b>100%</b>	<b>388,947,891</b>	<b>100%</b>	<b>396,726,849</b>	<b>100%</b>	<b>404,661,386</b>	<b>100%</b>	<b>412,754,614</b>	
<b>Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Infrastruktur dan kewilayahan Mendorong Perbaikan Kinerja Pemerintah Daerah</b>														
<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan</b>														
<i>(Output)</i>	Nilai Kualitas Perencanaan Kinerja Lingkup Bidang	%	N/A	100%	332,301,854	100%	388,947,891	100%	396,726,849	100%	404,661,386	100%	412,754,614	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja Pembangunan Lingkup Bidang Infrastruktur dan kewilayahan</b>	<b>Infrastruktur dan kewilayahan</b>													
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)														
<i>(Output)</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Dokumen	5 Dokumen	2 Dokumen	152,774,568	2 Dokumen	155,830,059	2 Dokumen	158,946,661	2 Dokumen	162,125,594	3 Dokumen	165,368,106	
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)														
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
<i>(Output)</i>	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	N/A	2 Laporan	20,564,600	2 Laporan	20,975,892	2 Laporan	21,395,410	2 Laporan	21,823,318	2 Laporan	22,259,784	
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														
<i>(Output)</i>	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	N/A		-	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,500,000	1 Laporan	26,010,000	1 Laporan	26,530,200	
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Infrastruktur														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)														
<i>(Output)</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Dokumen	5 Dokumen	2 Dokumen	138,402,309	2 Dokumen	141,170,355	2 Dokumen	143,993,762	2 Dokumen	146,873,638	3 Dokumen	149,811,110	
Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)														
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan														
<i>(Output)</i>	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	N/A	1 Laporan	20,560,377	1 Laporan	20,971,585	1 Laporan	21,391,016	1 Laporan	21,818,837	1 Laporan	22,255,213	
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan														
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan														
<i>(Output)</i>	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	N/A	-		1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,500,000	1 Laporan	26,010,000	1 Laporan	26,530,200	
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Kewilayahan														
<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>														
<i>(Outcome)</i>		%	N/A	100%	92,636,612	100%	94,489,344	100%	96,379,131	100%	98,306,714	100%	100,272,848	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengukuran Kinerja dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah													
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah														
(Output)	Nilai Kualitas Dokumen Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah	%	N/A	100%	92,636,612	100%	94,489,344	100%	96,379,131	100%	98,306,714	100%	100,272,848	
Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Pemerintah Daerah														
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota														
(Output)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	13 Laporan	14 Laporan	81,226,752	14 Laporan	82,851,287	14 Laporan	84,508,313	14 Laporan	86,198,479	14 Laporan	87,922,449	
Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota														
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
(Output)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	2 Laporan	1 Laporan	11,409,860	1 Laporan	11,638,057	1 Laporan	11,870,818	1 Laporan	12,108,235	1 Laporan	12,350,399	
Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>					<b>123,485,775</b>		<b>125,955,491</b>		<b>128,474,600</b>		<b>131,044,092</b>		<b>133,664,974</b>	
(Outcome)	Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja	%	N/A	100%	28,900,236	100%	29,478,241	100%	30,067,806	100%	30,669,162	100%	31,282,545	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengukuran Kinerja Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan kinerja	Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia													
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia														
<i>(Output)</i>	Nilai Kualitas Dokumen Pengukuran Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	N/A	100%	28,900,236	100%	29,478,241	100%	30,067,806	100%	30,669,162	100%	31,282,545	
Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia														
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														
<i>(Output)</i>	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	9 Laporan	3 Laporan	14,176,792	3 Laporan	14,460,328	3 Laporan	14,749,534	4 Laporan	15,044,525	3 Laporan	15,345,416	
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
<i>(Output)</i>	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	14,723,444	3 Laporan	15,017,913	3 Laporan	15,318,271	4 Laporan	15,624,637	3 Laporan	15,937,129	
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<i>(Outcome)</i>	Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	N/A	100%	53,955,450	100%	55,034,559	100%	56,135,250	100%	57,257,955	100%	58,403,114	
Pengukuran Kinerja Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan kinerja														
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam														
<i>(Output)</i>	Nilai Kualitas Dokumen Pengukuran Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	N/A	100%	53,955,450	100%	55,034,559	100%	56,135,250	100%	57,257,955	100%	58,403,114	
Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam														
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
<i>(Output)</i>	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	24,978,029	3 Laporan	25,477,590	3 Laporan	25,987,141	3 Laporan	26,506,884	3 Laporan	27,037,022	
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam														
<i>(Output)</i>	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	28,977,421	2 Laporan	29,556,969	2 Laporan	30,148,109	2 Laporan	30,751,071	2 Laporan	31,366,092	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam	Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA													
<b>(Outcome)</b>	<b>Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>%</b>	<b>N/A</b>	<b>100%</b>	<b>40,630,089</b>	<b>100%</b>	<b>41,442,691</b>	<b>100%</b>	<b>42,271,545</b>	<b>100%</b>	<b>43,116,975</b>	<b>100%</b>	<b>43,979,315</b>	
<b>Pengukuran Kinerja Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan kinerja</b>														
<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan</b>														
<b>(Output)</b>	<b>Nilai Kualitas Dokumen Pengukuran Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>%</b>	<b>N/A</b>	<b>100%</b>	<b>40,630,089</b>	<b>100%</b>	<b>41,442,691</b>	<b>100%</b>	<b>42,271,545</b>	<b>100%</b>	<b>43,116,975</b>	<b>100%</b>	<b>43,979,315</b>	
<b>Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>														
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
<b>(Output)</b>	<b>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</b>	<b>Laporan</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>20,334,988</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>20,741,688</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>21,156,522</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>21,579,652</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>22,011,245</b>	
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
(Output)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	20,295,101	1 Laporan	20,701,003	1 Laporan	21,115,023	1 Laporan	21,537,324	1 Laporan	21,968,070	
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan														
<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>					<b>329,409,000</b>		<b>875,997,180</b>		<b>893,517,124</b>		<b>911,387,466</b>		<b>929,615,215</b>	
<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>														
(Outcome)	<b>Persentase Hasil Kelitbangan yang Diseminasikan</b>	%	N/A	100%	<b>329,409,000</b>	100%	<b>875,997,180</b>	100%	<b>893,517,124</b>	100%	<b>911,387,466</b>	100%	<b>929,615,215</b>	
Meningkatnya Diseminasi Hasil Kelitbangan														
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan														
(Output)	<b>Persentase Hasil Kelitbangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang Memenuhi Standar</b>	%	N/A	100%	<b>91,973,000</b>	100%	<b>213,812,460</b>	100%	<b>218,088,709</b>	100%	<b>222,450,483</b>	100%	<b>226,899,493</b>	
Hasil Kelitbangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Memenuhi Standar														
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah														
(Output)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan	N/A	-	-	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	30,600,000	1 Laporan	31,212,000	1 Laporan	31,836,240	
Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum														
<i>(Output)</i>	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	N/A	-		1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	30,600,000	1 Laporan	31,212,000	1 Laporan	31,836,240	
Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum														
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi														
<i>(Output)</i>	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	91,973,000	1 Laporan	93,812,460	1 Laporan	95,688,709	1 Laporan	97,602,483	1 Laporan	99,554,533	
Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi														
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa														
<i>(Output)</i>	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Laporan	N/A	-		1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	30,600,000	1 Laporan	31,212,000	1 Laporan	31,836,240	
Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa														
Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan														
<i>(Output)</i>	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Laporan	N/A			1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	30,600,000	1 Laporan	31,212,000	1 Laporan	31,836,240	
Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>														
<i>(Output)</i>	<b>Persentase Hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang Memenuhi Standar</b>	%	N/A	-	100%	180,000,000	100%	183,600,000	100%	187,272,000	100%	191,017,440		
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial														
<i>(Output)</i>	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,600,000	1 Dokumen	31,212,000	1 Dokumen	31,836,240		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial														
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan														
<i>(Output)</i>	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	N/A	-	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,600,000	1 Dokumen	31,212,000	1 Dokumen	31,836,240		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan														
Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga														
<i>(Output)</i>	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Dokumen	N/A	-	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,600,000	1 Dokumen	31,212,000	1 Dokumen	31,836,240		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga														
Penelitian dan Pengembangan Pariwisata														
<i>(Output)</i>	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,600,000	1 Dokumen	31,212,000	1 Dokumen	31,836,240		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pariwisata														
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan														
<i>(Output)</i>	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen	N/A	-	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,600,000	1 Dokumen	31,212,000	1 Dokumen	31,836,240		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kesehatan														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat														
<i>(Output)</i>	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Dokumen	N/A	-		1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,600,000	1 Dokumen	31,212,000	1 Dokumen	31,836,240	
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat														
<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>														
<i>(Output)</i>	<b>Persentase Hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Memenuhi Standar</b>	%	N/A	-		100%	240,000,000	100%	244,800,000	100%	249,696,000	100%	254,689,920	
<b>Hasil Kelitbangan Bidang Bidang Ekonomi dan Pembangunan Memenuhi Standar</b>														
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah														
<i>(Output)</i>	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	N/A	-		1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,600,000	1 Dokumen	31,212,000	1 Dokumen	31,836,240	
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah														
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan														
<i>(Output)</i>	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Jumlah Dokumen Hasil Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	N/A	-		1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,600,000	1 Dokumen	31,212,000	1 Dokumen	31,836,240	
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Terlaksananya Perindustrian dan Perdagangan														
Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah														
<i>(Output)</i>	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Dokumen	N/A	-		1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,600,000	1 Dokumen	31,212,000	1 Dokumen	31,836,240	
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan														
<i>(Output)</i>	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	N/A	-		1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,600,000	1 Dokumen	31,212,000	1 Dokumen	31,836,240	
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan														
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan														
<i>(Output)</i>	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Dokumen	N/A	-		1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,600,000	1 Dokumen	31,212,000	1 Dokumen	31,836,240	
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan														
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup														
<i>(Output)</i>	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	N/A	-		1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,600,000	1 Dokumen	31,212,000	1 Dokumen	31,836,240	
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup														
Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum														
<i>(Output)</i>	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen	N/A	-		1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,600,000	1 Dokumen	31,212,000	1 Dokumen	31,836,240	
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum														
Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika														
<i>(Output)</i>	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Dokumen	N/A	-		1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,600,000	1 Dokumen	31,212,000	1 Dokumen	31,836,240	
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika														
<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>														
<i>(Output)</i>	<b>Persentase Usulan Inovasi Perangkat Daerah yang Teraftar Indeks Inovasi Daerah (IID)</b>				<b>237,436,000</b>		<b>242,184,720</b>		<b>247,028,414</b>		<b>251,968,983</b>		<b>257,008,362</b>	
<b>Inovasi Daerah Bermutu</b>														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan														
<i>(Output)</i>	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	N/A	1 Laporan	237,436,000	1 Laporan	242,184,720	1 Laporan	247,028,414	1 Laporan	251,968,983	1 Laporan	257,008,362	
Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan														

Sumber : Hasil Analisis Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya 2025.

**Tabel 4.3.**  
**Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program**  
**Prioritas Pembangunan Daerah**

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	<b>Meningkatnya Pemanfaatan data statistik dalam Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	
			Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	
			Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
			Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	
			Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
2.	<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	<b>Perencanaan Pembangunan Daerah Mendorong Perbaikan Kinerja Pemerintah Daerah</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	
			Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	
			Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	
			Pelaksanaan Konsultasi Publik	
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
			Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
			<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	
			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
			<b>Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</b>	
Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di				

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Bidang Pembangunan Daerah	
		<b>Pengukuran Kinerja dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	
			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
<b>3.</b>	<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Mendorong Perbaikan Kinerja Pemerintah Daerah</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
		<b>Pengukuran Kinerja Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dimanfaatkan dalam perbaikan</b>	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<b>perencanaan kinerja</b>	Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
		<b>Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Mendorong Perbaikan Kinerja Pemerintah Daerah</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam</b>	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam	
		<b>Pengukuran Kinerja Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan kinerja</b>	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam	
		<b>Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Infrastruktur dan kewilayahan</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan</b>	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
		<b>Mendorong Perbaikan Kinerja Pemerintah Daerah</b>	Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan			
			<b>Pengukuran Kinerja Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan kinerja</b>	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		
<b>4.</b>	<b>Program Penelitian dan Pengembangan</b>			<b>Meningkatnya Diseminasi Hasil Kelitbangan</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	
					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah,				

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Reformasi Birokrasi	
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	
			Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	
			<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	
			Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	
			Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	
			Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	
			Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	
			Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	
			<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	
			Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	
			Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	
			Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	
			Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	
			Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	
			Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	
			Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	
			<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	
			Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang	

Sumber : Hasil Analisis Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya 2025.

#### **4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan indikator kinerja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan RPJMD sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.4.**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya**

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Poin	21,90	22	22,10	22,20	22,30	22,40	
2.	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Poin	17,95	18,25	18,55	18,85	19,15	19,50	
3.	Persentase Hasil Kajian Penelitian Daerah Yang Dirujuk Dalam Dokumen Perencanaan	Persen	100	100	100	100	100	100	
4.	Indeks Inovasi Daerah	Poin	50,62	51,02	51,42	51,82	52,22	52,62	
5.	Indeks Pembangunan Statistik	Poin	2,69	2,76	2,83	2,90	2,95	3,02	

*Sumber : Hasil Analisis Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya 2025.*

**Tabel 4.5.**  
**Indikator Kinerja Kunci**  
**Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya**

Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. IKK Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya disamakan dengan Indikator Kinerja Utama. Sehingga Indikator Kinerja Kunci pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Poin	21,90	22	22,10	22,20	22,30	22,40	
2.	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Poin	17,95	18,25	18,55	18,85	19,15	19,50	
3.	Persentase Hasil Kajian Penelitian Daerah Yang Dirujuk Dalam Dokumen Perencanaan	Persen	100	100	100	100	100	100	

4.	Indeks Inovasi Daerah	Poin	50,62	51,02	51,42	51,82	52,22	52,62	
5.	Indeks Pembangunan Statistik	Poin	2,69	2,76	2,83	2,90	2,95	3,02	

*Sumber : Hasil Analisis Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya 2025.*

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra telah dilaksanakan sesuai tahapan penyusunan dan verifikasi untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah telah selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029.

Dengan selesainya penyusunan, Rencana Strategis ini dipergunakan sebagai :

1. Pedoman bagi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam mewujudkan tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan strategi melalui pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra);
2. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja sebagai dokumen perangkat daerah tahunan;
3. Pedoman dan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sebagai dasar pengendalian dan

evaluasi kinerja;

4. Pedoman pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Strategis ini dilakukan secara berkala untuk memastikan konsistensi antara perencanaan dan realisasi capaian kinerja.

## **5.2. Kaidah Pelaksanaan**

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan yaitu menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Kaidah pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 diantaranya sebagai berikut:

1. Seluruh Bidang dan Sekretariat di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya wajib melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 secara optimal, terukur, dan bertanggung jawab;
2. Setiap Bidang dan Sekretariat wajib menyusun serta menetapkan dampak (*impact*), hasil (*outcome*), dan keluaran (*output*) dari masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dengan berpedoman pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029;
3. Penjabaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Tahun 2025-2029 untuk setiap tahun pelaksanaan dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang penyusunannya dikoordinasikan oleh Sekretariat yang menangani urusan perencanaan;

4. Apabila berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 diperlukan penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 menjadi pedoman utama dalam penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dan selanjutnya Renja digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

### **5.3. Pedoman Transisi**

Dalam penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya diperlukan pedoman transisi sebagai instrumen pengarah untuk menjamin kesinambungan, konsistensi, dan stabilitas penyelenggaraan fungsi perencanaan pembangunan daerah pada masa peralihan kebijakan perencanaan.

Pedoman transisi diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya setelah Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten

Tasikmalaya berakhir. Dalam rangka keberlanjutan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya, maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.

Penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 karena dokumen Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 masih belum ditetapkan. Dikarenakan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 harus menjadi satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari kebijakan dan indikasi program prioritas dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029, maka penyusunan Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dengan memperhatikan visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah terpilih yang tertuang pada Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029. Selanjutnya, Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 tersebut digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Perubahan Anggaran Tahun 2025.

2. Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026.  
Dikarenakan saat penyusunan Rancangan Akhir Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026

dokumen Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 belum ditetapkan, maka penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 berpedoman pada Rancangan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 yang harus memperhatikan visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah terpilih.

3. Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2030.

Penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2030 disusun dalam rangka transisi dengan memperhatikan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 serta RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029.

Pedoman transisi seperti diuraikan di atas bersifat dinamis menyesuaikan dengan perkembangan regulasi yang terkait dengan proses penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan Pilkada serentak pada Tahun 2029.

